



OPTIMALISASI SAMBANG OLEH BHABINKAMTIBMAS DALAM MENCEGAH PAHAM RADIKALISME DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA

Ray Sobar

Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang

Email: ray_sobar@gmail.com

ABSTRAK

Sampai saat ini, masalah terorisme masih menjadi masalah yang cukup serius di Indonesia. Masih banyak jaringan terorisme yang berkeliaran di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu contohnya adalah penangkapan terduga teroris yang terjadi di Bekasi pada desember 2016. Dari hasil pengembangan kasus tersebut, ditemukan jejak terduga teroris adalah berasal dari jaringan teroris yang ada di wilayah Surakarta. Oleh karena itu diperlukan upaya preemtif dari Polri berupa kegiatan sambang yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas untuk mencegah berkembangnya paham radikal tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan sambang oleh Bhabinkamtibmas di wilayah Surakarta, faktor – faktor yang mempengaruhinya, serta bagaimana mengoptimalkan pelaksanaan sambang yang dilakukan oleh Bhabinakmtibmas dalam mencegah paham radikalisme di wilayah Surakarta. Adapun teori yang digunakan adalah teori manajemen, konsep optimalisasi, dan analisis SWOT. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan sambang yang dilakukan oleh Bhabinakmtibmas dalam mencegah paham radikalisme di Surakarta, penulis menggunakan teori manajemen, sedangkan kaitannya dengan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sambang tersebut, penulis mengalisa dengan analisis SWOT. Pendekatan yang dilakukan penulis adalah pendekatan kualitatif, dari peneliti ini tentunya bisa mengetahui gambaran secara nyata dengan cara studi lapangan, wawancara dan telaah dokumen. Temuan yang diperoleh penulis pada saat melaksanakan penelitian di Polresta Surakarta yaitu pelaksanaan sambang yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas sudah cukup baik, namun pada umumnya hal tersebut belum maksimal karena beberapa faktor yang mempengaruhi seperti masih ada Bhabinkamtibmas yang dilibatkan dalam tugas jaga di Polsek, sarana dan prasarana masih kurang dan perlu beberapa cara atau langkah untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan sambang tersebut. Dari hasil temuan penelitian di

lapangan, maka penulis merekomendasikan kepada Satbinmas Polresta agar lebih meningkatkan wasdal terhadap anggota, meningkatkan pelatihan dan kemampuan komunikasi, serta melengkapi sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan sambang yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas.

Kata Kunci : Optimalisasi, sambang POLRI, Bhabinkamtibmas,

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Salah satu masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah masalah terorisme. Kita ketahui bersama bahwa terorisme di Indonesia sampai sekarang masih menjadi gangguan kamtibmas yang paling berbahaya. Berdasarkan pasal 6 Perppu nomor 1 tahun 2002, yang dimaksud terorisme adalah, Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Sudah banyak fasilitas – fasilitas publik yang menjadi sasaran pengeboman yang dilakukan oleh berbagai jaringan teroris di Indonesia yang menelan banyak korban jiwa dan juga mengakibatkan banyak kerusakan serta kehancuran di fasilitas publik tersebut. Maka sesuai dengan bunyi pasal di atas, tindakan ini sudah termasuk ke dalam tindak pidana terorisme. Sehingga masyarakat Indonesia khawatir akan keselamatan diri mereka karena ancaman teroris tersebut tidak mengenal waktu, tempat, dan juga kita tidak pernah tau siapa yang akan menjadi target dari serangan teroris tersebut. Lihat saja belakangan ini banyak terjadi penangkapan terduga teroris oleh pihak kepolisian di berbagai kota di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa jaringan para teroris ini tidak hanya berada di satu kota saja, tetapi sudah tersebar di seluruh Indonesia.

Contoh kasus teror bom di Indonesia yang paling dahsyat adalah bom bali I yang terjadi pada 12 oktober 2002. Peristiwa ini menyebabkan korban tewas 204 orang dan 250 orang luka – luka. Sebagian besar korban dari peristiwa ini adalah para turis yang berada di bali. Dari hasil pengusutan kasus ini muncul seorang tersangka yang bernama Imam Samudra. Imam adalah salah satu dari kelompok teroris yang melakukan pengeboman di bali tersebut. Motif dari pengeboman ini adalah kebencian terhadap bangsa dan budaya barat. Asep adisaputra dalam bukunya yang berjudul *Imam Samudra Berjihad* mengatakan bahwa, “dalam aksi pengeboman di bali, tindakan imam samudra secara garis

besar didasari dari keyakinan jihad dan bertujuan untuk memerangi amerika serikat dan sekutu – sekutunya, karena dianggap telah banyak melakukan penganiayaan dan kekejaman terhadap umat muslim di dunia” (Asep Adisaputra, 2006:xiv)

Selain dari peristiwa di atas, banyak lagi kejadian teror bom yang terjadi di Indonesia diantaranya adalah : Hotel JW Marriott 2003, Kedubes Australia 2004, Bom Bali II 2005, Bom JW Marriott dan Ritz-Carlton 2009, dan yang terbaru adalah Bom Sarinah pada 2016. Dari semua aksi teror ini, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa yang bertanggung jawab atas semua aksi tersebut adalah kelompok – kelompok islam radikal garis keras. Contohnya adalah pada bom JW Marriott tahun 2003 dan bom Bali II tahun 2005, yang menjadi tersangka adalah Noordin M. Top, buronan yang paling dicari pada saat itu dan merupakan anggota dari Jemaah Islamiyah. Sementara Jemaah Islamiyah sendiri adalah organisasi militan islam yang bercita-cita mendirikan negara islam di Asia Tenggara.

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa sebagian besar terorisme di indonesia didasari atas paham radikalisme, yaitu kefanatikan yang sangat tinggi terhadap sebuah agama, sehingga penganut dari aliran tersebut tidak segan – segan untuk melakukan kekerasan bahkan membunuh terhadap orang – orang yang berbeda paham, aliran, atau berbeda agama dengan mereka. Hampir semua jaringan teroris di indonesia merupakan kelompok – kelompok islam radikal. Mereka bertindak melawan hukum karena tidak senang dengan modernisasi di Indonesia yang dianggap sangat dipengaruhi oleh budaya kebarat – baratan yang menurut mereka adalah budaya kafir, sehingga harus dihilangkan dari Indonesia. Sehingga mereka merealisasikan kebencian mereka dengan melakukan pembunuhan massal, salah satunya dengan cara meledakkan bom di tempat – tempat keramaian.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya paham radikalisme islam tersebut, di antaranya adalah :

- a. Penindasan dan diskriminasi terhadap umat islam di beberapa negara yang mayoritas penduduknya adalah non-muslim, sehingga memancing kemarahan kaum muslim yang tinggal di negara – negara islam seperti Irak, Afganistan dan sebagainya.
- b. Kebodohan atau kesalahpahaman sebagian umat islam akan masalah hukum agama terutama masalah jihad. Sehingga membuka kesempatan untuk menyebarkan doktrin dan aliran sesat untuk melakukan tindakan terorisme. Dalam hal ini sangat dibutuhkan peran para Ulama dan guru-guru besar Islam untuk mencegah munculnya paham radikalisme tersebut
- c. Kurangnya pengawasan dari pihak penegak hukum yang berwenang dalam mengawasi pergerakan kelompok-kelompok yang mempunyai potensi untuk melakukan tindakan terorisme.

Selain dari beberapa faktor di atas, masih banyak lagi faktor-faktor penyebab paham radikalisme di Indonesia yang masih belum bisa diatasi secara maksimal oleh pihak-pihak yang berwenang.

Tentu masyarakat Indonesia masih ingat dengan peristiwa yang terjadi di bulan Desember tahun lalu di Bekasi, penemuan barang yang diduga adalah bom oleh tim Densus 88 Polri. Berikut ini adalah kutipan berita dari Tribunsolo terkait kasus tersebut :

Petugas kepolisian menemukan benda diduga bom di dalam sebuah rumah yang berada di Jalan Bintara Jaya 8, Kota Bekasi, Sabtu (10/12/2016). "Ada penangkapan terduga teroris, dua laki-laki, satu perempuan dan barang yang diduga bom, sekarang sedang diupayakan untuk dijinakkan," ujar Umar, Kapolresta Bekasi. Menurut Umar, saat ini Densus 88 sedang menjinakkan bom tersebut. Radius 200 meter dari rumah kontrakan tersebut disterilkan. Densus 88 menggerebek rumah tersebut sejak pukul 14.00. Hingga saat ini polisi masih mempertimbangkan akan membawa bom tersebut atau diledakkan di lokasi. (Tribunsolo, 10 Desember 2016 : URL)

Dari hasil pengembangan kasus tersebut, ditemukan fakta bahwa teroris yang tertangkap di Bekasi ini merupakan jaringan teroris yang berada di Surakarta. Fakta ini dibuktikan dengan ditangkapnya beberapa terduga teroris disana. Salah satunya adalah penangkapan yang dilakukan Densus 88 terhadap terduga teroris berinisial Y di kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta. Dari hasil penggeladahan, ditemukan barang bukti berupa 4 paspor dan salinan kartu keluarga.

Oleh sebab itu, Polri sebagai pemegang fungsi keamanan negara seharusnya bisa melakukan upaya pencegahan agar tidak berkembang paham-paham Islam radikal yang lebih luas di Indonesia khususnya di Kota Surakarta ini. Sesuai dengan yang dicantumkan pada pasal 5 UU no. 2 tahun 2002 tentang Polri, Polri mempunyai peran yaitu sebagai berikut :

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Selain itu, berkaitan dengan masalah radikalisme di Indonesia Polri juga mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadapnya karena hal tersebut berpotensi untuk menimbulkan perpecahan bangsa. Hal ini juga tercantum di dalam pasal 15 huruf d UU no. 2 tahun 2002 yaitu, "mengawasi

aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa”.

Dalam hal ini, Polri mempunyai fungsi teknis Binmas yang bertugas menjalankan dan melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan dalam penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian masyarakat (Polmas), melaksanakan pengawasan masyarakat, melaksanakan koordinasi keamanan masyarakat baik dalam bentuk pam swakarsa (pengamanan swakarsa), polsus (Perpolisian khusus), serta menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat. Pelaksana tugas polmas menurut Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 ada 2, yaitu pengemban polmas dan Bhabinkamtibmas. Salah satu pelaksanaan tugas polmas yang diemban oleh bhabinkamtibmas adalah melalui kegiatan sambang. Dalam kegiatan sambang ini Bhabinkamtibmas dapat memberikan penyuluhan, penerangan dan arahan yang berkaitan dengan upaya preemtif dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme di Indonesia khususnya di Surakarta.

.Atas dasar inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang tindakan yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas dalam mnencegah paham radikalisme yang berkembang di wilayah Polresta Surakarta. Untuk itu maka judul yang dibuat untuk penelitian ini adalah : **“OPTIMALISASI SAMBANG OLEH BHABINKAMTIBMAS DALAM MENCEGAH PAHAM RADIKALISME DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA”**

1.2 Perumusan Permasalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang dipaparkan di atas serta untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini, maka fokus permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimanakah optimalisasi sambang oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah paham radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta. Oleh sebab itu perumusan masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan sambang oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah paham radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta saat ini ?
- b. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan oleh Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polresta Surakarta ?
- c. Bagaimana mengoptimalkan pelaksanaan sambang oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah paham radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah berusaha menggali dan mengetahui bagaimana pelaksanaan sambang yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah paham radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta secara mendalam. Selain itu, tujuan khusus penelitian ini adalah :

- a. Mendeskripsikan pelaksanaan sambang oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah paham radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta.
- b. Menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sambang oleh Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polresta Surakarta.
- c. Mengoptimalkan pelaksanaan sambang oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah paham radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkannya, terutama bagi Polri sendiri. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

- a. Ditinjau dari kepentingan teoritis / akademis, diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi dalam memperkaya khasanah khususnya dalam perkembangan ilmu kepolisian dengan mengaplikasikan konsep-konsep dan teori yang ada agar pelaksanaan kegiatan kepolisian dapat optimal.
- b. Ditinjau dari kepentingan praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan konstruktif bagi institusi kepolisian dalam pelaksanaan sambang dalam mencegah paham radikalisme. Disamping itu bagi Bhabinkamtibmas diharapkan dapat memahami dan menguasai teknis pelaksanaan sambang agar tidak menimbulkan permasalahan baru dan menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan sehari-harinya serta untuk memperlancar proses pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa mengesampingkan prosedur yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan secara optimal khususnya di wilayah hukum Polresta Surakarta.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian berisi tentang deskripsi analitis bahan-bahan bacaan dari hasil penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Tujuan dari kepustakaan penelitian adalah menghindari adanya peniruan dan plagiat. Menunjukkan bahwa penelitian ini baru dan melengkapi penelitian sebelumnya.

Ada beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Hirtrita Risky Andisga, mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dibuat pada tahun 2013, berjudul “Peranan Bhabinkamtibmas dalam Upaya Deteksi Dini Terhadap Konflik yang Terjadi di dalam Masyarakat” dan dalam penelitian tersebut Hirtrita Risky Andisga merumuskan permasalahan skripsinya ke satu pokok permasalahan yaitu “Bagaimanakah peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya deteksi dini terhadap konflik yang terjadi di masyarakat”. Dari hasil penelitian tersebut di temukan :

Bhabinkamtibmas menjalankan peranannya sebagai pembina, pembimbing, pelindung, dan fasilitator di dalam masyarakat di wilayahnya yaitu di Kecamatan Banyumanik, dengan melakukan deteksi dini terhadap konflik yang terjadi di masyarakat melalui pemetaan konflik yang sudah pernah terjadi dengan konflik yang belum pernah terjadi, serta koordinasi dengan beberapa pihak yang terkait.

Metodologi penelitian yang dilakukan Hirtrita Risky Andisga dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus. Kemudian sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Kemudian penelitian kedua yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Andi Suryadi, mahasiswa PTIK 66 yang berjudul “Implementasi Polmas Melalui Kegiatan Pre-Emtif Oleh Satuan Binmas Polres Keerom Guna Mencegah Terjadinya Ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata”. Ada beberapa perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini :

- a. Bagaimanakah gambaran terjadinya aksi kekerasan oleh KKB di kabupaten keerom ?
- b. Bagaimanakah peran Satuan Binmas Polres Keerom dalam menerapkan strategi polmas melalui kegiatan pre-emptif guna mencegah ancaman KKB ?
- c. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Satuan Binmas Polres Keerom dalam menerapkan strategi polmas melalui kegiatan pre-emptif guna mencegah ancaman KKB ?

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Andi Suryadi ditemukan bahwa :

- a. KKB merupakan salah satu gerakan radikal yang ada di propinsi papua, khususnya di kabupaten keerom. Kelompok ini berbeda dengan OPM dari aspek organisasinya, dimana OPM memiliki hirarki dan tingkatan komando secara jelas. Sedangkan KKB tidak jelas strukturnya, dan cenderung beraksi di satu wilayah saja yang dikuasainya. Para anggota KKB melakukan aksi anarkis, yang menyebabkan masyarakat dan aparat penegak hukum menjadi korban jiwa. Sampai saat ini anggota KKB di bawah pimpinan Lambert Perkikir masih ada di kabupaten keerom. Motif anggota KKB melakukan penyerangan karena kecemburuan sosial, ekonomi, dan ingin mengganggu situasi keamanan yang ada di kabupaten keerom.
- b. Peran satuan binmas polres keerom dalam melakukan strategi polmas melalui pre-emptif sangatlah penting. Polmas dilaksanakan dengan mengedepankan fungsi dan tugas pokok bhabinkamtibmas. Secara khusus pencegahan ancaman KKB melalui Polmas sudah berjalan baik dengan memberikan hasil dan manfaat positif. Namun Polmas tidak dilakukan secara menyeluruh di 7 (tujuh) distrik, mengingat keterbatasan anggota,

kendaraan bermotor, dan lokasinya yang sulit ditempuh karena berada di pengunungan.

- c. Faktor yang mendukung terdiri atas aturan hukum yang menjadi dasar oleh anggota dalam melaksanakan Polmas dengan baik dan mencapai sasaran, koordinasi antar fungsi yang terjalin, dan kemampuan anggota yang sesuai harapan. Faktor penghambat adalah jumlah anggota minim, dan saran kendaraan bermotor yang terbatas.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan penulis dengan dua penelitian diatas adalah pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah pada pelaksanaan sambang yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas sebagai salah satu pelaksana Polmas. Kemudian perbedaan mendasar dari penelitian ini adalah pemilihan lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Andi Suryadi berada di wilayah Polres Keerom. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berada di wilayah Polresta Surakarta.

Untuk lebih jelasnya mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian dari penulis sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Perbedaan dan persamaan skripsi terdahulu

NO	PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Hirtitra Risky Andisga (Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Deteksi Dini Terhadap Konflik Yang Terjadi Di Dalam Masyarakat)	Pendekatan kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian • Waktu dan tempat penelitian
2	Ahmad Andi Suryadi (Implementasi Polmas melalui Kegiatan Pre-emptif Oleh Satuan Binmas Polres Keerom guna mencegah terjadinya ancaman kelompok kriminal bersenjata)	Pendekatan kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian • Waktu dan tempat penelitian
3	Ray sobar (optimalisasi sambang oleh bhabinkamtibmas dalam mencegah paham radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta)	Pendekatan kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian • Waktu dan tempat penelitian

2.2 Kepustakaan Konseptual

Dalam sebuah penelitian, untuk mendukung proses analisis permasalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, diperlukannya landasan teori. Sehingga dalam penelitiannya skripsi ini dapat diarahkan kepada tujuan penelitian sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan.

2.2.1 Konsep Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata “optimal artinya terbaik, tertinggi, paling menguntungkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi” (KBBI, 17 Januari 2017, URL). Sedangkan imbuhan “sasi” menyatakan suatu proses Sehingga optimalisasi bisa diartikan sebagai proses mengoptimalkan sesuatu, proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. (Dahlanforum.wordpress, 17 Januari 2017, URL).

Dalam penelitian ini, Optimalisasi sambang berarti membuat pelaksanaan sambang menjadi paling baik, paling tinggi untuk mencegah paham radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta.

2.2.2 Teori Manajemen

Dalam suatu organisasi fungsi manajemen memegang peranan yang sangat penting. Hal ini tidak terlepas dari peran seorang manajer atau pimpinan dalam menerapkan manajemennya. Menurut Terry (2009: 9). Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Terry (2009: 9) juga menjelaskan bahwa manajemen merupakan kegiatan; pelaksanaannya disebut managing dan orang yang melakukannya disebut manager. Setiap manajer atau pemimpin harus menjalankan fungsi manajemen tersebut, sehingga hasilnya merupakan suatu keseluruhan yang sistematis. Dalam teori manajemen, Terry (2009: 16) mengklarifikasikan manajemen sebagai berikut :

a. Planning (perencanaan)

Perencanaan menurut Terry (2009: 17) adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Selanjutnya Terry (2009: 17) menyatakan bahwa perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif alternatif keputusan.

b. Organizing (pengorganisasian)

Pengorganisasian menurut Terry (2009: 17) meliputi: (a) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kedalam kelompok-kelompok, (b) membagi tugas kepada seorang manager untuk mengadakan pengelompokan tersebut, dan (c) menetapkan wewenang diantara kelompok tersebut atau unit-unit organisasi. Selanjutnya Terry (2009: 17) menyatakan bahwa didalam setiap kejadian, pengorganisasian melahirkan peranan kerja dalam struktur formal dan dirancang untuk memungkinkan manusia bekerja sama secara efektif guna mencapai tujuan bersama.

c. Actuating (menggerakkan)

Menggerakkan menurut Terry (2009: 17) mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manager untuk mengawasi dan melanjutkan kegiatan yang

ditetapkan unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Dalam pengertian tersebut dapat diartikan bahwa kegiatan menggerakkan adalah kegiatan lanjutan dari proses perencanaan dan pengorganisasian yang telah ditetapkan sebelumnya kedalam bentuk pelaksanaan suatu kegiatan.

d. Controlling (pengendalian)

Pengawasan menurut Terry (2009: 18) mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Selanjutnya Terry (2009 : 18) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik.

2.2.3 Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sambang oleh bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polresta Surakarta. Penulis mengutip teori ini dari Bahan Ajar/Modul Manajemen Perencanaan dan Penganggaran karya Karyoso, Yustianus, M. Erwan (2012:49-50) yang mengatakan bahwa: “dalam rangka pengambilan suatu keputusan dalam perencanaan strategik, diperkenalkan salah satu model perencanaan dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats)”.

Lebih lanjut Analisis SWOT yang diperkenalkan dalam buku ini adalah yang dimunculkan oleh Kearns pada 1992, seperti yang terlihat dalam diagram. Diagram tersebut menampilkan enam kotak, dua kotak yang paling atas adalah kotak-kotak yang berisi faktor eksternal, yaitu peluang (Opportunities), dan ancaman / tantangan (Threats). Sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah kotak-kotak yang berisi faktor-faktor internal yaitu kekuatan (Strengths) dan kelemahan (weaknesses) suatu organisasi. Empat kotak lainnya A,B,C, dan D adalah isu-isu strategik yang timbul sebagai hasil kontak antara faktor-faktor eksternal dan internal. Keempat isu tersebut adalah (A) Comparative Advantage, (B) Mobilization, (C) Invesment/Divesment, dan (D) Damage Control.

Sel A, Comparative Advantage memungkinkan bagi organisasi untuk berkembang lebih cepat, namun harus juga senantiasa waspada terhadap perubahan yang tidak menentu dalam lingkungan strategik yang ada. Pertanyaannya adalah bagaimana memanfaatkan peluang yang ada guna meningkatkan posisi kompetitif organisasi.

Sel B, Mobilization yaitu merupakan kotak interaksi dan pertemuan antara ancaman/tantangan dari luar yang diidentifikasi oleh para pengambil keputusan dengan kekuatan organisasi. Disini para eksekutif hendaknya berusaha memobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kalau mungkin dapat merubahnya sebagai peluang.

Sel C, Invesment/divesment yang memberi pilihan bagi para eksekutif, karena situasinya kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan, namun organisasi tidak memberikan reaksi positif dan tidak mempunyai kemampuan untuk menggarapnya. Apabila hal ini dipaksakan, bisa jadi akan memakan biaya

yang terlalu besar, sehingga merugikan organisasi. Lebih baik apabila ditinggalkan peluang tersebut dan diberikan kepada organisasi lain yang mungkin memiliki posisi yang lebih baik, atau bahkan bisa juga para eksekutif tidak berbuat apa-apa.

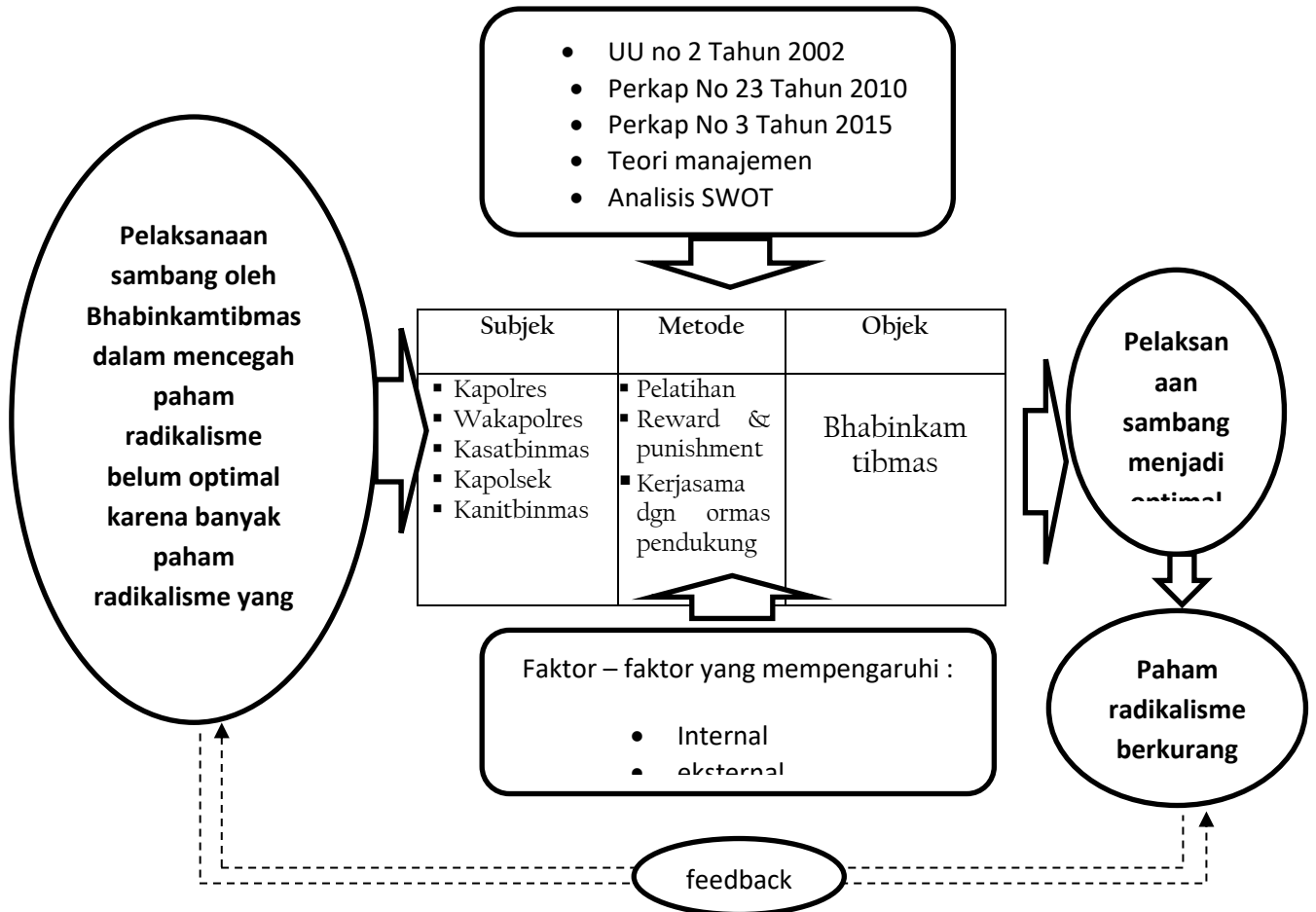
Sel yang terakhir adalah sel D merupakan kotak yang paling lemah dari semua sel, karena dapat membawa bencana bagi organisasi, atau paling tidak akan merugikan program-programnya. Situasinya sudah terancam dari luar, lalu dihadapi dengan sumber daya yang sangat lemah. Strategi yang harus ditempuh adalah mengendalikan kerugian yang diderita, sehingga tidak separah yang diperkirakan. Usaha itu diarahkan pada upaya mengalihkan kelemahan menjadi kekuatan, sungguhpun mungkin akan memakan waktu yang cukup lama/ tidak sedikit.

Analisis SWOT digunakan peneliti untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sambang yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polresta Surakarta sebagai upaya preemtif dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme. Dengan Analisis SWOT tersebut peneliti dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang ada dan mempengaruhi pelaksanaan sambang yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polresta Surakarta.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dibuat agar memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian agar lebih fokus pada permasalahan yang diangkat. Sehingga dalam menjawab permasalahan yang telah dituangkan dapat berjalan secara teratur dan sistematis serta memiliki alur yang mengalir.

Gambar 2.1
Kerangka berpikir



METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara analisis yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Secara umum, pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Kedua pendekatan penelitian ini mempunyai ciri khas masing-masing, termasuk jenis data, sumber data, dan teknik analisa data.

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif karena lebih menekankan pada pengumpulan dan pengolahan data dalam bentuk uraian. Menurut Moleong (2007:5) “penelitian kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang”.

Adapun menurut Muhammad dan Djali (2005:90), seperti yang dikutip Suryadi (2015:41) ciri-ciri penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat eksploratif
- b. Teori lahir dan dikembangkan di lapangan
- c. Proses berulang-ulang
- d. Pembahasan lebih bersifat kasus dan spesifik
- e. Mengandalkan kecermatan dalam pengumpulan data untuk mengungkap secara tepat keadaan yang sesungguhnya di lapangan

Kemudian jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut dapat berasal dari hasil wawancara, dokumen pribadi ataupun dokumen resmi. Sehingga penelitian deskriptif ini akan menggambarkan secara apa adanya situasi di tempat dilakukannya penelitian berdasarkan fakta, fenomena, dan hubungan sosial di lapangan. Begitu pula dengan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana optimalisasi program door to door yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah paham radikalisme di Surakarta.

3.2 Fokus penelitian

Fokus penelitian diperlukan agar penelitian ini lebih terarah dan fokus pada rumusan permasalahan yang diangkat.

Fokus penelitian adalah pemusatan fokus kepada intisari penelitian yang akan dilakukan. hal tersebut harus dilakukan dengan cara eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan observasi/pengamatan. Fokus penelitian merupakan garis terbesar dalam jantungnya penelitian mahasiswa, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian bakal menjadi lebih terarah. (<http://markasfisika.blogspot.com>, 23 januari 2017)

Dengan bimbingan dan arahan sebuah fokus, seorang peneliti tahu persis data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengoptimalkan pelaksanaan sambang oleh bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polresta Surakarta. Penelitian ini juga akan menggambarkan faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan sambang tersebut baik yang mendukung maupun yang menghambat. Sehingga diharapkan pelaksanaan sambang oleh Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polresta Surakarta dapat dilaksanakan secara optimal.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Polresta Surakarta. Berdasarkan intel dasar Polresta Surakarta, masih banyak kelompok – kelompok islam garis keras yang berada di wilayah hukum Polresta Surakarta sehingga penulis melakukan penelitian dengan fokus permasalahan pelaksanaan sambang oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah paham radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta.

3.4 Sumber data / Informasi

Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif perlu ditentukan sumber data atau informasi yaitu keterangan tentang dari mana data perlu akan dicari. Sumber data terbagi menjadi 2 jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain” (lofland dan lofland, 1984, seperti kutipan moleong, 2007:157). Sumber data primer bisa dilakukan dengan cara wawancara terhadap informan penting yang dianggap berkompeten dalam permasalahan di penelitian ini. “Sumber data primer dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video / audio tapes, pengambilan foto, atau film” (Moleong, 2007:157). Sumber data primer yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah :

- a. Kapolresta Surakarta
- b. Kasatbinmas Polresta Surakarta
- c. Kanitbinmas Polsek Banjarsari
- d. Bhabinkamtibmas
- e. Tokoh masyarakat

Kemudian untuk sumber data sekunder bisa didapatkan melalui penelusuran dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polresta Surakarta.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah kegiatan yang bersifat mikro atau teknis yang dilakukan untuk memperoleh data. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. “Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan” (Andi Prastowo, 2011, seperti kutipan Firdaus pamungkas, 2013:35). Hal ini sangat penting mendukung proses pengumpulan data dan agar peneliti mendapatkan data-data yang diinginkan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan orang yang dipercaya untuk memberikan informasi terkait penelitian ini. Selain itu, maksud dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan sambang oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah paham radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta.
- b. Observasi
Observasi dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri dengan kehidupan dan situasi objek yang akan diteliti. Peneliti berbaur dengan mereka dan sama-sama terlibat dengan pengalaman dan kegiatan yang sama. Hal demikian memungkinkan peneliti untuk melihat adanya dinamika-dinamika dalam masyarakat yang akan diteliti dan dapat memperoleh hal-

hal secara khas terkait objek yang akan diteliti. Beberapa manfaat observasi adalah sebagai berikut :

1. Peneliti lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan diperoleh pandangan yang menyeluruh.
2. Memperoleh pengalaman langsung, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Pendekatan induktif memungkinkan untuk melakukan penemuan.
3. Peneliti dapat menemukan hal-hal yang kurang yang tidak diamati orang lain, khususnya orang-orang yang berada dalam lingkungan itu, karena telah dianggap sebuah kebiasaan dan tidak akan terungkap dalam wawancara.
4. Menemukan hal-hal yang bersifat sensitif dan biasanya ditutupi pada saat wawancara karena merugikan nama lembaga.

Teknik observasi ini sangat berguna karena peneliti akan mendapatkan informasi yang bersifat alami dan sesuai realita di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan sambang oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah paham radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta.

c. Studi dokumen

Studi dokumen adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui perundang-undangan, dokumen resmi, dan data lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari wawancara dan observasi akan lebih kredibel jika didukung dengan hasil studi dokumen ini.

3.6 Validitas Data

Dalam penelitian, uji validitas dan reliabilitas sering dilakukan untuk menekankan keabsahan data. Validitas adalah derajat kebenaran antara data yang diperoleh dengan fakta yang terjadi di lapangan, atau bisa dikatakan data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara yang dilaporkan peneliti dengan yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Diasumsikan jika pada objek penelitian yang ditemukan adalah warna hitam, maka peneliti melaporkan warna hitam. Jadi jika peneliti membuat laporan yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi pada objek penelitian, maka data tersebut dinyatakan tidak valid.

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Oleh karena itu bila terdapat 10 peneliti dengan latar belakang yang berbeda meneliti pada objek yang sama, akan mendapatkan 10 temuan, dan semuanya dinyatakan valid kalau apa yang ditemukan itu tidak berbeda dengan kenyataan sesungguhnya yang terjadi pada objek yang diteliti.

Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validitas internal), uji depenabilitas (reelibilitas) data, uji transferabilitas (validitas eksternal), dan uji konfirmabilitas (objektivitas). Namun yang utama adalah melakukan uji kredibilitas data, uji kredibilitas dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, member check, dan analisis kasus negatif.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi maupun dokumentasi dengan cara menyusun data ke dalam beberapa kategori, kemudian menyusun ke dalam pola, dan memilih mana data yang penting untuk digunakan dan kemudian membuat kesimpulan agar mudah dimengerti oleh orang lain

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang terkumpul secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut akan menjadi teori. (Sugiyono, 2014:89)

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Reduksi data juga merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan yang berkualitas.

Setelah melakukan reduksi data, maka tahap yang selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami temuan-temuan yang didapatkan, kemudian merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk kata-kata yang teratur dan sistematis sehingga akan memberikan nilai informasi kepada peneliti. Kemudian data yang telah disajikan tersebut akan dikaitkan dengan permasalahan yang dirumuskan. Data primer yang diperoleh melalui wawancara akan disajikan dalam bentuk kutipan secara utuh, sedangkan data sekunder dapat disajikan dalam bentuk gambar, tabel, atau grafik dengan keterangan penjelasannya.

Kemudian tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. "Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas" (Sugiyono, 2014:99). Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak didukung bukti-bukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan

didukung oleh bukti² yang kuat dan konsisten, maka kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang kredibel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami kondisi umum objek penelitian, maka disajikanlah suatu gambaran tentang situasi Kota Surakarta, tugas pokok dan struktur organisasi Polresta Surakarta serta gambaran paham radikalisme yang ada di wilayah hukum Polresta Surakarta

4.1.1 Situasi dan kondisi Wilayah Kota Surakarta

Daerah Hukum Polresta Surakarta Berada pada dataran rendah dengan ketinggian 92 meter diatas permukaan air laut terletak antara 110 ,45,15 dan 110 45 35 bujur timur dan antara 7, 36 dan 7,56 Lintang Selatan, suhu udara Lk. Antara 25,8 c-28,3 Celcius kelembaban udara berkisar 66-88 %. Kota Surakarta berada pada jalur lintas antara Kota Jogjakarta dan Semarang yang juga menjadi jalur penghubung Jakarta-Surabaya. Luas wilayah hukum Polresta Surakarta yaitu sebesar 4.404.059 Ha, dimana 60 % merupakan lahan pemukiman terdiri dari 5 kecamatan yaitu :

- a. Kec.Laweyan terdiri dari 11 Kelurahan
- b. Kec. Serengan terdiri dari 7 Kelurahan
- c. Kec.Pasar Kliwon terdiri dari 9 Kelurahan
- d. Kec.Jebres terdiri dari 11 Kelurahan
- e. Kec. Banjarsari terdiri dari 13 Kelurahan

Jumlah total kelurahan yang ada di wilayah hukum Polresta Surakarta sebanyak 51 kelurahan, terdiri dari 186 kampung, 595 RW, dan 2669 RT. Wilayah hukum Polresta Surakarta berbatasan langsung dengan Kabupaten lain yaitu :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.

Bentuk permukaan di wilayah hukum Polresta Surakarta sebagian besar adalah dataran rendah, hanya di bagian utara dan timur laut meliputi daerah Perumnas Mojosongo merupakan permukaan berbukit. Pemanfaatan lahan di kota Surakarta sendiri sebagian besar digunakan untuk tempat tinggal, selain itu pemanfaatan lahan di Kota Surakarta hampir seluruhnya digunakan untuk kegiatan penyedia jasa dan perdagangan. Perkembangan Kota Surakarta sendiri berawal pada tahun 1950 berdasarkan UU nomor 16 tahun 1950 tentang pembentukan daerah kota besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Surakarta telah memenuhi standar kriteria sebagai daerah otonom yang disebut dengan daerah Kotamadya Surakarta. Kemudian di dalam UU no 5 tahun 1974 disebutkan bahwa Kotamadya Surakarta disebut sebagai daerah tingkat II. Dan pada akhirnya di dalam UU no 22 tahun 1999 disempurnakan dengan UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, daerah tingkat II Surakarta disebut sebagai Kota Surakarta.

Gambar 4.1
Peta Kota Surakarta



Sumber : Intel dasar Polresta Surakarta

Dari aspek demografinya, jumlah penduduk di Kota Surakarta adalah sebanyak 563.659 jiwa, terdiri dari 278.644 laki-laki dan 285.015 perempuan. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Penyebaran penduduk berdasarkan kelompok umur

NO	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI + PEREMPUAN	
		JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0-4	19.816	7,11	18.945	6,65	38.761	6,88

2	5-9	22.726	8,16	21.208	7,44	43.934	7,79
3	10-14	23.089	8,29	22.277	7,82	45.366	8,05
4	15-19	22.139	7,95	21.179	7,43	43.318	7,69
5	20-24	20.779	7,46	20.109	7,06	40.888	7,25
6	25-29	21.655	7,77	21.644	7,59	43.299	7,68
7	30-34	25.585	9,18	25.432	8,92	51.017	9,05
8	35-39	23.246	8,34	23.365	8,20	46.611	8,27
9	40-44	21.418	7,69	22.291	7,82	43.709	7,75
10	45-49	19.594	7,03	21.254	7,46	40.848	7,25
11	50-54	17.585	6,31	19.350	6,79	36.935	6,55
12	55-59	14.522	5,21	15.350	5,39	29.872	5,30
13	60-64	10.462	3,75	10.729	3,76	21.191	3,76
14	65-69	5.970	2,14	7.267	2,55	13.237	2,35
15	70-74	4.559	1,64	6.037	2,12	10.596	1,88
16	>75	5.499	1,97	8.578	3,01	14.077	2,50
	Jumlah	278.644	100,00	285.015	100,00	563.659	100,00

Sumber : Intel Dasar Polresta Surakarta

Pada tabel tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk terbesar adalah pada kelompok usia 30-34 tahun yaitu sebanyak 51.017 jiwa, sedangkan yang paling sedikit adalah pada kelompok usia 70-74 yaitu hanya 10.596 jiwa. Dapat disimpulkan dari tabel tersebut bahwa penduduk yang berada dalam usia produktif cukup banyak di Kota Surakarta. Secara rinci penyebaran penduduk ke dalam 5 kecamatan di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2
Penyebaran penduduk per kecamatan

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI + PEREMPUAN	
		3	4	5	6	7	8
1	2						

1	LAWEYAN	53.457	18.52	55.807	18.75	109.264	18.64
2	SERENGAN	29.981	10.39	31.198	10.48	61.179	10.44
3	PASAR KLIWON	44.869	15.55	46.903	15.76	91.772	15.66
4	JEBRES	73.799	25.58	74.643	25.08	148.442	25.33
5	BANJARSARI	86.395	29.94	88.984	29.90	175.379	29.93
TOTAL		288.501	100	297.535	100	586.036	100

Sumber : Intel Dasar Polresta Surakarta

Dari sekian banyak penduduk di Kota Surakarta, sebagian besar profesi yang mereka lakukan adalah karyawan swasta yaitu sebesar 47 %. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tidak sedikit perusahaan swasta yang ada di Kota Surakarta. Mobilitas masyarakat di kota ini juga cukup tinggi karena dilewati oleh jalan lintas yang menghubungkan Kota Semarang, Jogjakarta, dan Surabaya. Sehingga setiap harinya kota ini banyak dilalui masyarakat tidak hanya masyarakat lokal tetapi juga masyarakat dari luar daerah Surakarta. Karena tingginya mobilitas masyarakat Surakarta dan beragamnya penduduk yang ada di Kota Surakarta, maka peran Bhabinkamtibmas sangat penting untuk menjaga ketertiban masyarakat melalui kegiatan – kegiatan polmas terutama pelaksanaan sambang dalam mencegah paham radikalisme yang berkembang di Kota Surakarta.

4.1.2 Struktur Organisasi Polresta Surakarta

Kepolisian Resort Kota Surakarta atau yang kemudian disingkat Polresta Surakarta yang mempunyai wewenang, tugas, serta fungsi Kepolisian di wilayah Kota Surakarta dibawah Polda Jateng. Polresta Surakarta bertugas untuk melaksanakan tugas pokok kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Polresta Surakarta.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 disebutkan :

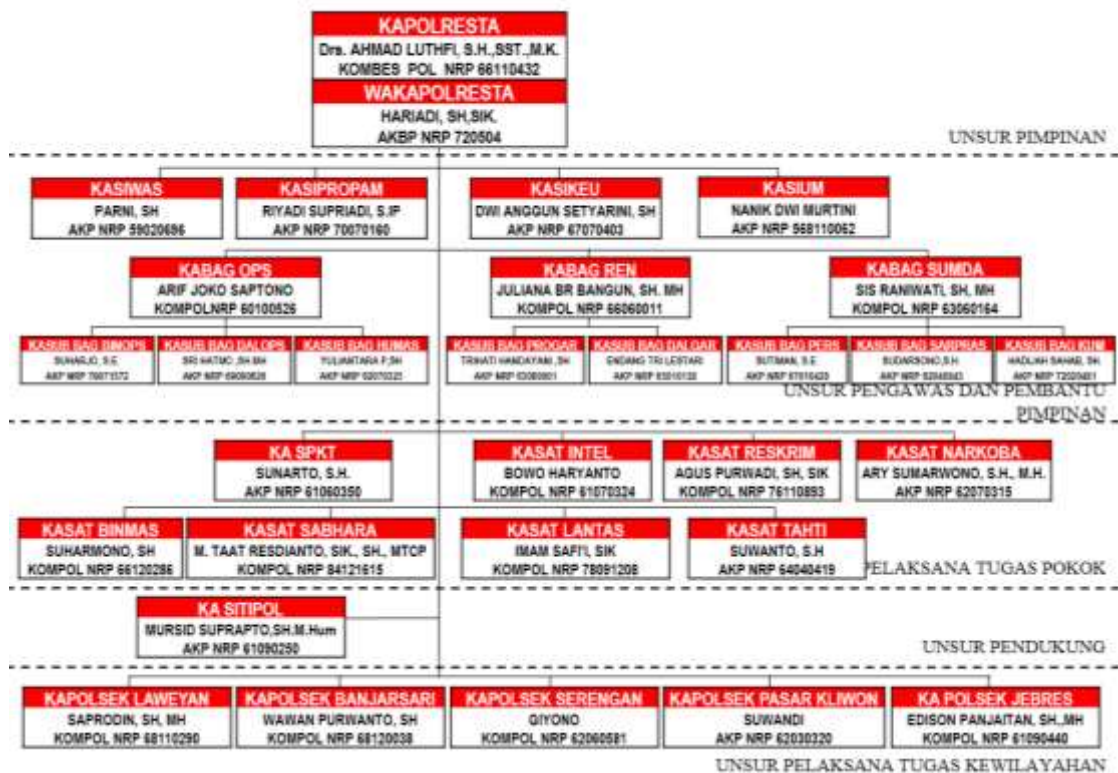
Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Sebagaimana bunyi pasal diatas maka Polres menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dan permintaan bantuan pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat ijin/keterangan, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.
- b. Intelejen dalam bidang keamanan, termasuk persandian, baik sebagai bagian kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polres dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
- c. Penyelidikan dan pendidikan tindak pidana, fungsi identifikasi, dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum.
- d. Kesamaptaan kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, dan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan obyek khusus yang meliputi VIP, pariwisata dan obyek vital/khusus lainnya, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Kamtibmas.
- e. Lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- f. Kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana dan pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai/perairan, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
- g. Bimbingan masyarakat, yang meliputi penyuluhan masyarakat dan pembinaan/pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan dan terjalinnya hubungan Polri dengan Masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
- h. Pembinaan hubungan kerja sama, yang meliputi kerja sama dengan organisasi / lembaga / tokoh / sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dan pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan penyidik PNS.
- i. Fungsi lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

Terkait dengan tugas pokok yang diemban oleh Polresta Surakarta, maka dalam setiap kegiatan menggunakan struktur organisasi yang disusun seperti pada gambar berikut ini :

Gambar 4.2
Struktur organisasi Polresta Surakarta



Sumber : Intel Dasar Polresta Surakarta

Keterangan gambar :

- KAPOLRESTA : Kepala Kepolisian Resort
- WAKAPOLRESTA : Wakil Kepala Kepolisian Resort
- SIWAS : Seksi Pengawasan
- SIPROPAM : Seksi Profesi dan Pengamanan
- SIKEU : Seksi Keuangan
- SIUM : Seksi Umum
- BAGOPS : Bagian Operasional
- BAG REN : Bagian Perencanaan
- BAG SUMDA : Bagian Sumber Daya
- SPKT : Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
- SATRESKRIM : Satuan Reserse Kriminal
- SAT NARKOBA : Satuan Narkoba
- SAT SABHARA : Satuan Sabhara
- SATLANTAS : Satuan Lalu Lintas
- SATBINMAS : Satuan Pembinaan Masyarakat
- SATINTELKAM : Satuan Intelejen Keamanan
- SATTAHTI : Satuan Tahanan dan Barang Bukti
- SATPOLAIR : Satuan Kepolisian Perairan
- SITIPOL : Sistem Teknologi Informasi Polri
- POLSEK : Kepolisian Sektor

Dari gambar struktur organisasi diatas, maka dapat dilihat bahwa unsur pimpinan yang terdapat di Polresta Surakarta adalah Kapolres serta Wakapolres. Kemudian untuk unsur pengawas dan pembantu pimpinan terbagi atas Seksi Pengawasan, Seksi Profesi dan pengamanan, Seksi Keuangan, Seksi Umum, Bagian Operasional, Sub Bagian Pengendalian Operasional, dan Sub Bagian Hubungan Masyarakat. Pada Bagian perencanaan juga terbagi atas beberapa Sub Bagian yang terdiri dari Sub Bagian Program Anggaran, Sub Bagian Pengendalian Anggaran. Bagian Sumber Daya terbagi atas Sub Bagian Personalia, Sub bagian Sarana dan Prasarana serta Sub Bagian Hukum. Sedangkan untuk pelaksana tugas pokok sendiri terdiri dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), serta Satuan-Satuan pada fungsi Teknis Kepolisian yaitu Satuan Intelejen Keamanan, Satuan Reserse Kriminal, Satuan Reserse Narkoba, Satuan Pembinaan Masyarakat, Satuan Samapta Bhayangkara, Satuan Lalu Lintas, Satuan Tahanan dan Barang Bukti, serta unsur pendukung yaitu sitipol. Untuk unsur pelaksana kewilayahan di Polresta Surakarta terdiri dari 5 Kepolisian Sektor sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Kota Surakarta.

Untuk data personil Polesta Surakarta sendiri, berikut akan disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Data personil Polresta Surakarta

No	Pangkat	Jumlah
1	KOMBESPOL	1
2	AKBP	1
3	KOMPOL	16
4	AKP	70
5	INSPEKTUR	73
6	AIPTU	388
7	AIPDA	67
8	BRIPKA	220
9	BRIGADIR	238
10	BRIPTU	8
11	BRIPDA	87
12	PNS	107
TOTAL		1276
DSP		1110

Sumber : Data sekunder diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah personil yang ada di Polresta Surakarta adalah sebanyak 1276 personil. Jumlah ini sudah melebihi dari jumlah yang seharusnya dimiliki oleh Polresta Surakarta yaitu sebanyak 1110. Dengan kelebihan jumlah personil tersebut tentu sangat menguntungkan bagi Polresta Surakarta untuk mendukung pelaksanaan tugas – tugas Polresta Surakarta, termasuk upaya – upaya dalam mencegah berkembangnya kelompok – radikal yang ada di wilayah hukum Polresta Surakarta.

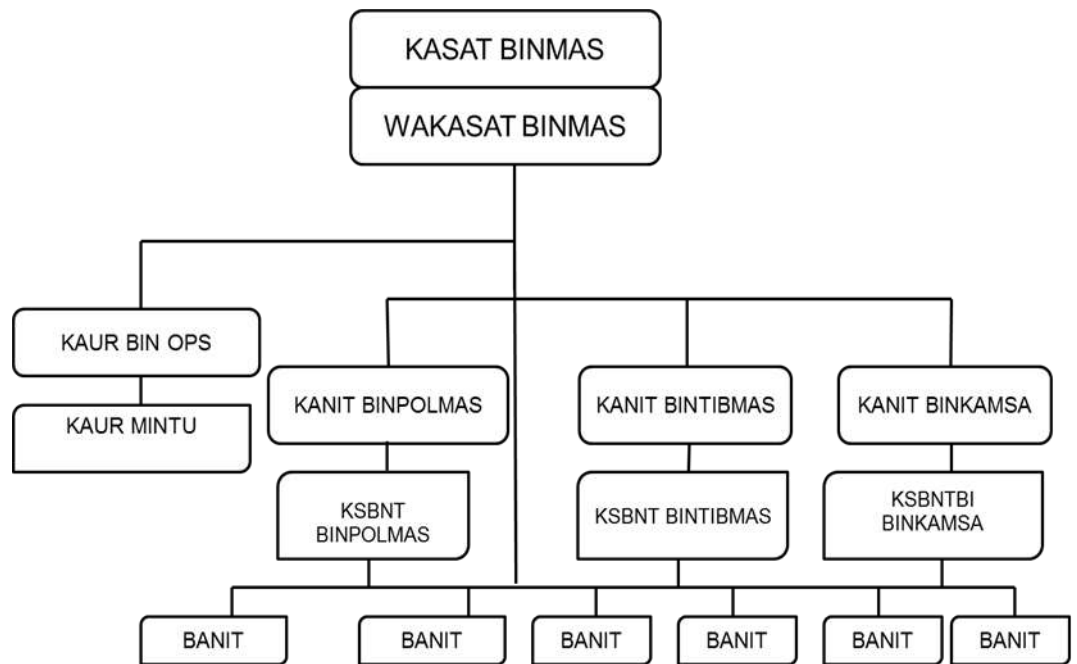
4.1.3 Situasi dan Kondisi Satuan Binmas Polresta Surakarta

Satuan Binmas merupakan salah satu satuan yang terdapat di Polresta Surakarta yang mengemban fungsi teknis Kepolisian. Satuan Binmas Polres Surakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Satuan Binmas berperan dalam memberikan pembinaan terhadap masyarakat yang meliputi penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Polmas, melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk Pam Swakarsa, Polsus, serta kegiatan kerjasama dengan organisasi, lembaga, instansi, tokoh masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan serta terpeliharanya Kamtibmas, selain itu juga bertugas untuk memberikan pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakat. Satuan Binmas adalah Unsur pelaksana Tugas pokok yang berada di bawah kapolres. Secara umum satuan Binmas Polresta Surakarta berguna untuk menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan dan pengembangan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang – undangan
- b. pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat
- c. pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak
- d. pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus serta Satuan Pengamanan (Satpam)
- e. pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi dan/atau tokoh masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dalam kegiatannya perlu disusun suatu struktur organisasi Satuan Binmas yang tergambar seperti di bawah ini :

Gambar 4.3
Struktur organisasi Satbinmas



Sumber : Sat Binmas Polresta Surakarta

Keterangan gambar :

KASAT BINMAS : Kepala Satuan Binmas

KAUR MINTU : Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha

KAUR BIN OPS : kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat

BANIT : Bintara Unit

KANIT BIN TIBMAS : Kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat

KANIT BIN KAMSA : Kepala Unti Keamanan Masyarakat

KANIT BIN POLMAS : Kepala Unit Pembinaan Pemolisian Masyarakat.

Dari gambar struktur organisasi diatas, maka dapat dirumuskan bahwa Sat Binmas dipimpin oleh Kasat Binmas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres. Sementara itu Kasat Binmas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan administrasi di bidang Operasional, ketertiban masyarakat, pam swakarsa dan Polmas serta melaksanakan anev atas pelaksanaan tugas pmbinaan masyarakat di lingkungan Polres
- Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan
- Unit Perpolisian Masyarakat (Unitbinpolmas), yang bertugas membina dan mengembangkan kemampuan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka menyelesaikan masalah – masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
- Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Unitbintibmas), yang bertugas melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyarakat

terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak

- e. Unit Pembinaan Keamanan Masyarakat (Unitbinkamsa), yang bertugas melakukan pembinaan dan mengembangkan bentuk-bentuk pam swakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan teknis, pengkoordinasian dan pengawasan Polsus dan Satpam.

4.1.4 Gambaran Kelompok Radikal Islam Garis Keras Di Surakarta

Berdasarkan laporan kesatuan yang disampaikan Wakapolresta Surakarta pada tanggal 1 maret 2017 di Mapolresta Surakarta, masih banyak kelompok radikal yang ada di Kota Surakarta. Bahkan beberapa peristiwa terorisme yang pernah terjadi di Indonesia adalah berasal dari kelompok radikal yang berbasis di Kota Surakarta. Selain berperan dalam peristiwa terorisme, tindakan radikal yang dilakukan oleh kelompok tersebut khususnya di wilayah Kota Surakarta diantaranya adalah melakukan *sweeping* tempat – tempat hiburan yang ada di Surakarta seperti tempat jual minuman keras, tempat yang dianggap digunakan untuk judi, psk, dan cafe – cafe yang dianggap sesat oleh kelompok tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari tindakan ini adalah meresahkan masyarakat, mengganggu kenyamanan dan ketentraman lingkungan, menimbulkan rasa tidak simpati terhadap kelompok tersebut pastinya, dan bahkan timbul anggapan bahwa Polri tidak tegas terhadap masalah yang ditimbulkan oleh kelompok radikal tersebut. Kelompok - kelompok radikal ini biasanya melakukan aksinya pada saat minggu malam atau hari libur dan mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, dan tidak jarang juga mereka melakukan unjuk rasa untuk menolak kebijakan pemerintah. Berikut ini adalah daftar kelompok – kelompok radikal / islam garis keras yang ada di Kota Surakarta :

Tabel 4.4
Data kelompok radikal di Surakarta

No	Pok Radikal	Ketua	Alamat	Pengikut
1	2	3	4	5
1	Dewan Syariah Kota Surakarta	Dr. Muh Mu'inudinilah	Pajang, Laweyan	(pelindung pok radikal)
2	Laskar Umat Islam Surakarta	Edi Lukito	Tipes, Serengan	(kumpulan pok igaras)
3	Jamaah Anshorut Tauhid	Abdul Rochim Baasyir	Tipes, Serengan Jl. Kartini, Banjarsari	35 orang

4	Front Jihad Islam	Abu Alya	4	3000 orang
1			Semanggi, Pasar Kliwon	5
5	2 Hisbah	3 Agus Junaidi	Jl. Veteran no. 14 Pasar Kliwon	75 orang
6	Majelis Mujahidin Indonesia	Muhammad Thalib		40 orang

Sumber : data sekunder diolah

Untuk data yang lebih lengkapnya terkait pemimpin dari kelompok diatas, penulis lampirkan pada halaman lampiran. Motif dari tindakan kelompok – kelompok radikal yang ada di Kota Surakarta seperti pada tabel di atas adalah mereka ingin memberlakukan syariat islam secara keseluruhan di wilayah Surakarta bahkan di Indonesia, sehingga mereka menganggap musuh terhadap orang – orang yang tidak sepaham dengan mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya dari pihak kepolisian untuk mengantisipasi tindakan – tindakan dari kelompok radikal tersebut.

4.2 Pelaksanaan Sambang Oleh Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Paham Radikalisme Di Wilayah Hukum Polresta Surakarta dan Analisis

Kegiatan sambang yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas berada dibawah kendali langsung dari masing – masing Kapolsek. Akan tetapi, Kasatbinmas tetap membina dan mengawasi kinerja Kapolsek, Kanitbinmas Polsek, petugas polmas, dan Bhabinkamtibmas. Hanya saja kapasitas Kasatbinmas adalah sebagai pembina fungsi Binmas Khususnya dalam hal ini adalah sambang yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Satbinmas. Sehingga dalam pelaksanaannya selalu terdapat kordinasi antara petugas di wilayah kecamatan atau desa dengan Satbinmas Polresta Surakarta. Di samping itu, Kanitbinmas polsek bertugas untuk melakukan koordinasi dan melaporkan kegiatan sambang yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas kepada Kasatbinmas sehingga pelaksanaannya dapat dipantau dan diawasi oleh Kasatbinmas selaku pembina fungsi.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh Kasatbinmas Polresta Surakarta dalam program sambang sudah sesuai dengan dasar hukum yaitu dengan pemenuhan kebutuhan petugas Bhabinkamtibmas di Setiap Desa di wilayah hukum Polresta Surakarta. Hal ini sesuai dengan Surat Kapolri nomor B/4550/XII/2011/Baharkam tanggal 19 Desember 2011 tentang penetapan Pilot Project Penggelaran program “satu desa datu polisi”. Karena dari personel, Bhabinkamtibmas di wilayah

Polresta Surakarta sudah sesuai dengan jumlah kelurahan yang ada di Kota Surakarta yaitu 51 kelurahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat tabel data Bhabinkamtibmas yang penulis lampirkan di lampiran 5 pada halaman lampiran. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Bhabinkamtibmas yang ada di Polresta Surakarta sudah terbagi ke semua kelurahan yang ada di Kota Surakarta. Hal ini adalah salah satu kemudahan yang dapat mendukung pelaksanaan sambang oleh Bhabinkamtibmas karena masing – masing Bhabinkamtibmas hanya bertugas di satu kelurahan, sehingga wilayah yang menjadi tanggung jawab dari seorang Bhabinkamtibmas di Kota Surakarta ini tidak terlalu luas. Kegiatan sambang yang dilakukan dalam mencegah paham radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta sangat penting untuk dilakukan karena di Kota Surakarta sendiri banyak terdapat tempat – tempat yang dijadikan sebagai tempat berkumpul dari kelompok – kelompok radikal yang ada di Surakarta, baik berupa pondok – pondok maupun mesjid – mesjid. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Wakapolresta Surakarta AKBP Hariadi, S.ik, M.H pada wawancara hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 di ruang kerjanya, yaitu sebagai berikut :

Pada dasarnya pelaksanaan sambang oleh bhabinkamtibmas di Kota Surakarta ini sudah cukup efektif. Ini karena jumlah Bhabinkamtibmas yang ada di Polresta Surakarta ini sudah sesuai dengan jumlah kelurahan yang ada di wilayah Surakarta. Peran Bhabinkamtibmas disini juga sangat penting sebagai deteksi dini terhadap kelompok – kelompok radikal yang ada di wilayah Surakarta khususnya.

Peran Bhabinkamtibmas dalam hal ini adalah untuk deteksi dini sebagai informasi awal kepada anggota kepolisian di jajaran Polresta Surakarta untuk mengantisipasi jika sewaktu – waktu kelompok radikal tersebut akan melakukan suatu tindakan yang meresahkan masyarakat. Bhabinkamtibmas juga merupakan garda terdepan dalam penyampaian pesan – pesan kamtibmas kepada masyarakat terkhusus yang berkaitan dengan paham radikalisme yang ada di Kota Surakarta ini, baik terhadap masyarakat yang tidak tergabung dalam kelompok – kelompok radikal, bahkan juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan pendekatan terhadap kelompok – kelompok radikal tersebut. Tujuan dilakukannya pendekatan ini adalah agar timbul rasa simpati mereka terhadap anggota polri sebagai pemelihara kamtibmas khususnya di Kota Surakarta. Sehingga apabila kelompok – kelompok radikal tersebut akan melakukan suatu kegiatan mereka akan memberi informasi kepada Polri melalui Bhabinkamtibmas kemudian Polri dapat mengantisipasi apabila dalam kegiatan tersebut mereka akan melakukan tindakan radikal dan menimbulkan potensi gangguan keamanan.

Pelaksanaan sambang yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas di Polresta Surakarta juga sudah mendapat penilaian yang bagus baik dari pimpinan polres maupun dari masyarakat. Wakapolresta Surakarta AKBP Hariadi, S.ik, M.H juga mengatakan bahwa

Bhabinkamtibmas di Polresta Surakarta ini sudah cukup baik kinerjanya, hal ini dibuktikan dari laporan hasil kegiatan yang ada di satuan binmas, target yang diberikan kepada Bhabinkamtibmas sudah dapat dicapai dalam tugasnya yang terdapat di surat perintah yang dibuat sebelum kegiatan.

Kegiatan sambang yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas ini juga sangat ditanggapi secara positif oleh masyarakat Kota Surakarta, lebih lanjut Kasat Binmas Kopol Suharmono pada hasil wawancara hari selasa tanggal 7 maret 2017 mengatakan bahwa :

Sejauh ini, tanggapan dan reaksi dari masyarakat Kota Surakarta cukup positif, karena selain mereka paham akan kesadaran kamtibmas, masyarakat juga bisa kenal lebih dekat kepada polisi khususnya Bhabinkamtibmas yang bertugas di kelurahan mereka sendiri

Hal tersebut yang disampaikan oleh Kasatbinmas juga senada dengan yang disampaikan Bapak Sugiyo, salah satu warga kelurahan manahan, dalam hasil wawancara hari sabtu tanggal 11 maret 2017 :

Pak bhabinkamtibmas di daerah ini cukup aktif, setiap ada kegiatan di kelurahan pasti Pak Erki (Bhabinkamtibmas kelurahan Manahan) datang. Selain kegiatan resmi, pak erki juga sering ikut kumpul – kumpul bersama kita. Kita sebagai masyarakat ya cukup senang karena Pak Erki sangat membantu dalam penyelesaian masalah – masalah yang dialami warga

Dalam pelaksanaannya, kegiatan sambang oleh bhabinkamtibmas juga dibantu dengan program smile police yang dilaksanakan di jajaran Polda Jawa Tengah. Di dalam program smile police ini sudah termasuk program e-bhabinkamtibmas yang berperan sebagai sarana pelaporan bhabinkamtibmas kepada pimpinan terkait tugas yang dilaksanakan sehari – hari. Hal ini juga disampaikan oleh Kopol Suharmono selaku Kasat Binmas Polresta Surakarta

Di wilayah Polda Jawa Tengah sendiri, sudah ada program smile police yang di dalamnya ada fitur e-bhabinkamtibmas untuk mengawasi kinerja dari bhabinkamtibmas. Jadi hasil kegiatan dari bhabinkamtibmas akan langsung terlihat di fitur tersebut, termasuk kegiatan sambang yang dilakukan dalam pencegahan paham radikalisme.

Peran Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan sambang disini sangat penting karena Bhabinkamtibmas merupakan salah satu pelaksana tugas polmas sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2015 tentang polmas. Terlebih lagi Bhabinkamtibmas adalah yang bertanggung jawab terhadap desa atau kelurahan yang dibina. Lebih luas lagi, dalam pencegahan paham radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta secara keseluruhan Satbinmas juga berperan.

Pelaksanaan sambang yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di wilayah Polresta Surakarta akan dianalisis dengan teori manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.

Pada tahap yang pertama yaitu perencanaan, sebelum Bhabinkamtibmas melakukan sambang, akan dibuat surat perintah tugas. Dalam hal ini seperti di Polsek banjarsari, Kanit Binmas memberikan surat perintah tugas untuk pelaksanaan sambang di Kelurahan Gilingan oleh Aiptu Hasan Anwar seperti pada lembar lampiran. Kemudian setelah dibuatkan surat perintah,

Bhabinkamtibmas melaksanakan kegiatan sambang sesuai dengan rencana kegiatan bulanan yang sudah dibuat sebelumnya seperti yang tercantum pada lembar lampiran. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kanit Binmas Polsek Banjarsari AKP Iga Nyoman Suhartini, SH, MH pada wawancara hari senin tanggal 7 maret 2017 :

Sebelum Bhabinkamtibmas melaksanakan tugas, kita buat dulu surat perintahnya, kemudian setelah itu baru melaksanakan tugas sesuai rencana kegiatan yang juga sudah dibuat sebelumnya. Ini adalah bagian dari perencanaan sesuai dengan ilmu manajemen, nanti setelah kegiatan baru Bhabinkamtibmas membuat laporan hasil kegiatan.

Selain membuat surat perintah dan administrasi lainnya, Bhabinkamtibmas juga harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait apabila melakukan kegiatan sambang di acara resmi. Contohnya seperti penyuluhan di sekolah – sekolah, maka Bhabinkamtibmas koordinasi terlebih dahulu dengan pihak sekolah yang akan disambangi agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar

Selanjutnya adalah pengorganisasian, setelah melakukan tahap perencanaan, Kapolsek sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas memberikan penjabaran tugas sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Dalam hal ini, Kanitbinmas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sambang yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas kemudian melaporkan kepada Kapolsek

Kemudian pada tahap pelaksanaan, kegiatan sambang yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di wilayah Polresta Surakarta sudah cukup baik. Dari hasil observasi yang dilakukan penulis, Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan sambang cukup diterima baik oleh masyarakat. Banyak respon positif dari masyarakat ketika Bhabinkamtibmas menghadiri acara – acara di kelurahan, maupun ketika Bhabinkamtibmas mendatangi masyarakat yang sedang berkumpul di tempat – tempat yang sering dijadikan tempat berkumpul oleh masyarakat. Pada saat melakukan sambang, Bhabinkamtibmas sudah tidak lagi memperkenalkan diri karena hampir seluruh masyarakat sudah kenal dengan Bhabinkamtibmas yang bertugas di kelurahan mereka. Kecuali dalam acara formal seperti penyuluhan di sekolah – sekolah dan sebagainya, Bhabinkamtibmas tetap memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum menyampaikan materi. Hal ini seperti yang disampaikan Aipda Sumarsono saat wawancara di Polsek Banjarsari :

Biasanya saat melakukan sambang, saya tidak lagi memperkenalkan diri kepada warga, karena rata – rata warga sudah kenal dengan saya. Kecuali saat acara – acara resmi baru saya memperkenalkan diri sebelum menyampaikan materi. Karena biasanya saya sering menyambangi warga yang sedang berkumpul di warung atau di pos kamling. Jadi ya tidak terkesan kaku seperti acara formal.

Kemudian yang terakhir adalah tahap pengawasan. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan sambang oleh Bhabinkamtibmas di wilayah Polresta Surakarta dilakukan oleh Kasatbinmas selaku pembina fungsi maupun

oleh Kapolsek selaku penanggung jawab wilayah. Dalam hasil wawancara Kasatbinmas mengatakan :

Untuk kegiatan sambang yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas ini, pengawasan dan pengendalian adalah tanggung jawab saya selaku pembina fungsi dan juga Kapolsek selaku penanggung jawab wilayah. Jadi laporan kegiatan Bhabinkamtibmas selain kepada saya juga kepada Kapolsek.

Bentuk pengawasan yang dilakukan Kasatbinmas dapat berupa tertulis dalam bentuk laporan bulanan maupun melalui dokumentasi kegiatan yang dikirim melalui aplikasi *whats'app*. Penulis melampirkan laporan bulanan Bhabinkamtibmas pada halaman lampiran. Selain itu, Kasatbinmas juga biasanya melakukan pengawasan langsung ke lapangan, atau menanyakan kepada warga apakah Bhabinkamtibmas aktif dalam melaksanakan tugas atau tidak. Kemudian kegiatan selanjutnya dalam tahap pengawasan dan pengendalian adalah melakukan analisa dan evaluasi. Hali ini dimaksudkan agar kegiatan untuk waktu berikutnya dapat terlaksana lebih baik dengan memperbaiki kekurangan yang terjadi pada hasil evaluasi kegiatan sebelumnya.

4.3 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sambang Oleh Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Paham Radikalisme Di Wilayah Hukum Polresta Surakarta dan Analisis

Pelaksanaan sambang dalam mencegah paham radikalisme yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polresta Surakarta dipengaruhi oleh dua faktor yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini merupakan faktor-faktor yang menghambat maupun mendukung kegiatan sambang yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polresta Surakarta dalam rangka mencegah paham radikalisme di wilayah hukumnya. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Kasatbinmas Polresta surakarta Kopol Suharmono pada hari selasa tanggal 7 maret :

Dalam mencegah paham radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta ini, satuan binmas sudah melakukan berbagai upaya contohnya seperti penyuluhan, dan khususnya sambang. Dalam pelaksanaan sambang ini juga dipengaruhi berbagai faktor baik faktor yang mendukung maupun faktor yang menghambat.

Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi satuan binmas khususnya Bhabinkamtibmas dalam mencegah paham radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta penulis juga menggunakan teori analisis SWOT. Menurut Wheelen dan Hunger (2012 : 16), Teori analisis SWOT merupakan sebuah langkah untuk dapat mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Teori analisis SWOT juga dapat digunakan untuk menganalisis faktor internal maupun faktor eksternal yang berpengaruh, karena teori analisis SWOT merupakan sebuah metode yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk melihat kelebihan-kelebihan serta

kekurangan yang dimiliki oleh organisasi itu sendiri dalam proses pencapaian tujuan. Kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki organisasi dapat berasal dari dalam organisasi itu sendiri ataupun berasal dari organisasi. Berikut ini adalah analisis terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sambang oleh Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polresta Surakarta :

a. *Strengths* (kekuatan)

Strength merupakan suatu faktor internal yang dimiliki oleh sebuah organisasi dalam hal ini adalah satuan binmas yang dapat mendukung berjalannya organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini faktor internal yang dimiliki oleh satuan binmas yang dapat mendukung setiap kegiatan satuan binmas dapat berasal dari sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Binmas.

Jumlah Bhabinkamtibmas di Polresta Surakarta sudah memenuhi kebutuhan yaitu sebanyak 51 orang dan dengan jumlah itu sudah sesuai dengan jumlah kelurahan di Kota Surakarta yaitu 51 kelurahan. Data Bhabinkamtibmas di wilayah Polresta Surakarta dapat dilihat pada lampiran 5 di halaman lampiran. Sehingga dalam pelaksanaan sambang, tugas Bhabinkamtibmas tidak terlalu berat karena hanya bertanggung jawab kepada satu kelurahan. Selain itu, Bhabinkamtibmas di Polresta Surakarta juga didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Masing – masing Bhabinkamtibmas di Polresta Surakarta dibekali dengan sepeda motor untuk menunjang pelaksanaan sambang yang dilakukan untuk mencegah paham radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta.

Selain dukungan sepeda motor, Bhabinkamtibmas Polresta Surakarta juga mendapat dukungan BBM dari Satbinmas Polresta Surakarta yaitu sebanyak dua liter per hari, hal ini senada dengan yang diucapkan oleh Aipda Sumarsono, salah satu Bhabinkamtibmas Polsek Banjarsari pada hari rabu tanggal 8 maret 2017 :

Di Polresta Surakarta ini, seluruh bhabinkamtibmas di berikan sepeda motor untuk melaksanakan tugas sehari – hari. selain sepeda motor, pimpinan juga memberikan bensin sebanyak dua liter setiap harinya. bensin sebanyak dua liter tersebut sudah cukup untuk keperluan tugas dalam sehari karena wilayah Surakarta ini terbilang kecil, tidak terlalu luas.

Selain dukungan sarana dan prasarana seperti yang disebutkan di atas, faktor internal lain yang mendukung (*strengths*) pelaksanaan sambang oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah paham radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta adalah adanya apresiasi dari pimpinan terhadap Bhabinkamtibmas yang berprestasi. Kasatbinmas Polresta Surakarta selaku pembina fungsi sering memberikan apresiasi kepada Bhabinkamtibmas yang berprestasi baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk hadiah. Pemberian apresiasi ini juga dapat dilakukan pada saat pelaksanaan apel yaitu Bhabinkamtibmas yang berprestasi diperintahkan untuk tampil ke depan agar dapat diketahui oleh personil lainnya bahwa yang bersangkutan sudah bertugas dengan baik dan diharapkan Bhabinkamtibmas yang lain akan melakukan hal

yang sama. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kasatbinmas Polresta Surakarta Kumpul Suharmono pada wawancara tanggal 7 maret 2017 :

Kita juga sering memberikan apresiasi terhadap Bhabinkamtibmas yang berprestasi. Bentuk apresiasinya antara lain dengan memberikan hadiah, atau bisa juga dengan menampilkan yang bersangkutan ke depan barisan pada saat apel, agar anggota yang lain dapat mengikuti apa yang dilakukan yang bersangkutan.

Pemberian apresiasi dari pimpinan ini dapat menjadi kekuatan dan pendukung bagi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan sambang untuk mencegah paham radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta karena dengan demikian Bhabinkamtibmas akan menjadi termotivasi untuk melaksanakan tugas lebih baik lagi. Dan akan berdampak positif juga bagi anggota Polresta Surakarta secara keseluruhan karena akan meningkatkan kinerja anggota dalam memelihara ketertiban dan keamanan di wilayah Polresta Surakarta.

b. *Weakness* (kelemahan)

Weakness / kelemahan merupakan sebuah kekurangan yang dimiliki oleh sebuah organisasi yang dapat menjadi suatu penghambat atau kendala bagi organisasi itu sendiri dalam proses pencapaian tujuan. Kelemahan – kelemahan yang ada di Sarbinmas Polresta Surakarta ini merupakan bentuk dari faktor internal yang menghambat pelaksanaan sambang oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah paham radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta.

Kelemahan yang pertama yaitu kurangnya tingkat kepercayaan sesama anggota Polri. Karena kerawanan yang ada di Kota Surakarta terhadap tindakan terorisme, jadi di tiap – tiap Polsek di Wilayah Polresta Surakarta di bentuk sebuah pos jaga, dan yang bertugas jaga disitu adalah personel Bhabinkamtibmas yang ada di wilayah Polsek tersebut. Jadi sewaktu – waktu ada kegiatan di kelurahan maka Bhabinkamtibmas yang kebetulan sedang mendapat tugas jaga sesuai jadwalnya, harus ijin untuk mengikuti kegiatan di kelurahan tersebut. Namun terkadang rekan kerjanya beranggapan bahwa petugas Bhabinkamtibmas tersebut hanya mencari – cari alasan untuk mangkir dari tugas jaga di Polsek. Hal ini sesuai dengan pernyataan Aipda Sumarsono pada wawancara hari rabu tanggal 8 maret 2017 di Polsek banjarasari :

Selain kita harus bertugas sebagai Bhabinkamtibmas di kelurahan, kita juga mendapat tugas jaga di Polsek mas, jadi terkadang ketika ada kegiatan di kelurahan sewaktu kita sedang jadwal jaga, kita harus ijin untuk menghadiri acara kelurahan tersebut. Maka anggapan anggota yang lain kita sedang mangkir dari tugas. Hanya saja terkadang saya merasa tidak enak apabila diundang acara di kelurahan jika saya tidak hadir. Karena pada prinsipnya kita harus menghadiri setiap acara yang ada di kelurahan.

Kelemahan yang kedua adalah masih ada Bhabinkamtibmas di Polresta Surakarta yang masih belum latihan pendidikan Bhabinkamtibmas. Kondisi semacam ini menyebabkan masih terdapat Bhabinkamtibmas Polresta Surakarta yang kurang mampu menguasai teknik-teknik komunikasi sosial dengan baik,

sebagai contoh belum mampu berbicara atau menyampaikan pesan kepada massa atau masyarakat banyak dimana hal tersebut sebenarnya merupakan modal yang cukup mendasar bagi setiap anggota Polri khususnya Bhabinkamtibmas untuk dapat menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam pelaksanaan sambang. Dari 51 Bhabinkamtibmas yang ada di Polresta Surakarta, masih ada 9 yang belum mengikuti latihan Bhabinkamtibmas. Berikut ini adalah data Bhabinkamtibmas Polresta Surakarta yang belum mengikuti latihan :

Tabel 4.5
Data Bhabinkamtibmas yang belum latihan

No	Nama	Pangkat	Polsek
1	2	3	4
1	Sugiarto	AIPTU	Laweyan
2	Bambang. Is	AIPTU	Laweyan
3	Sumarlan	AIPTU	Banjarsari
4	Tata Samekta	AIPTU	Serengan
5	Anton Sulistyono	BRIGADIR	Serengan
6	Sudarsono	AIPTU	Pasar Kliwon
7	Agus Satriyo	AIPTU	Jebres
8	Budi Waspodo	AIPTU	Serengan
9	Tukirin	AIPDA	Jebres

Sumber : Data sekunder diolah

Kondisi diatas tentunya menjadi suatu penghambat bagi satuan binmas khususnya Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat. Dengan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik maka himbauan-himbauan dari kepolisian yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas tidak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, baik itu himbauan-himbauan agar masyarakat tertib hukum maupun himbauan-himbauan agar masyarakat waspada terhadap segala bentuk tindak kejahatan termasuk paham radikalisme yang berkembang di Kota Surakarta.

Kendala lain yang dimiliki oleh satuan binmas Polresta Surakarta dalam melakukan upaya pencegahan paham radikalisme adalah berkenaan dengan masalah anggaran. Penerimaan anggaran bagi kegiatan Satuan Binmas masih sering terlambat sehingga dapat mempengaruhi perencanaan kegiatan terkait program-program yang telah dibuat. Hal ini dapat dikatakan sebagai penghambat karena operasional kegiatan sat binmas menjadi berjalan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dan sasaran yang dicapai tidak sesuai dengan harapan.

c. *Opportunity* (peluang)

Peluang merupakan faktor eksternal yang mendukung sebuah organisasi melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan, dengan tersedianya peluang untuk melakukan kegiatan maka sebuah organisasi dapat melaksanakan kegiatan

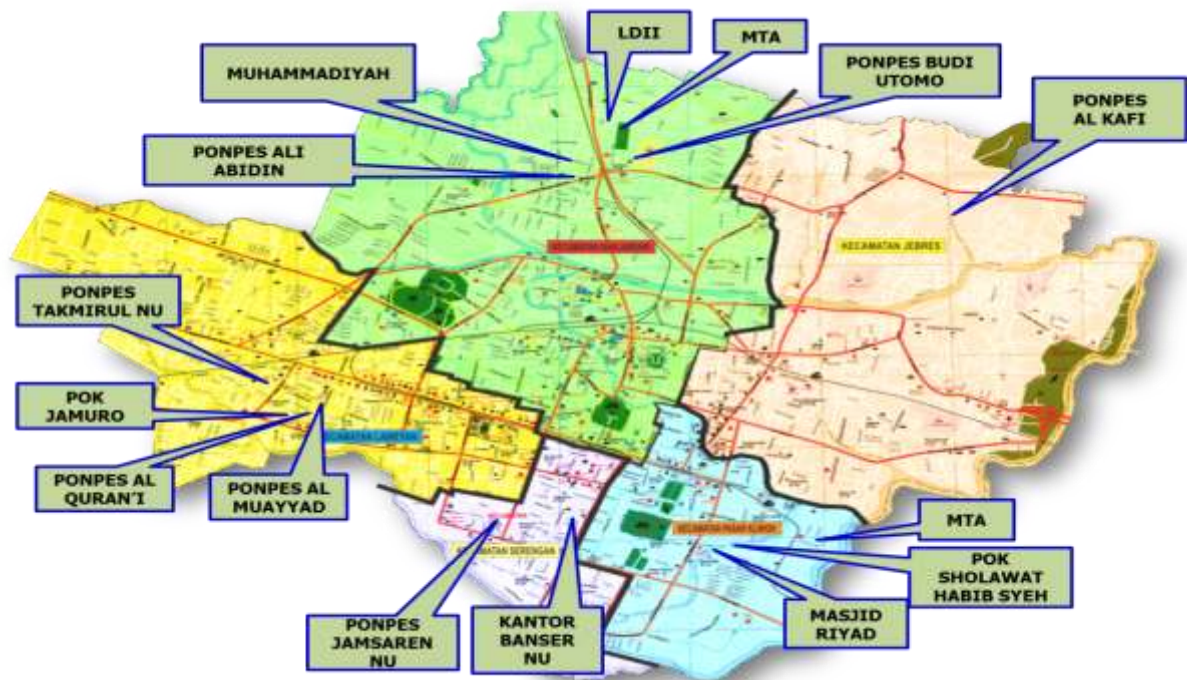
tersebut sehingga mampu membantu organisasi tersebut. Dalam pelaksanaan sambang yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah paham radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta terdapat beberapa peluang yang mendukung yang pertama yaitu masih banyak ormas – ormas islam yang pro NKRI. Sehingga upaya Bhabinkamtibmas dalam mencegah paham radikalisme dan kelompok igaras sangat terbantu dengan adanya ormas – ormas pro NKRI tersebut. Berdasarkan laporan kesatuan Polresta Surakarta yang disampaikan oleh Wakapolresta Surakarta AKBP Hariadi, S. Ik, MH pada hari kamis tanggal 2 maret 2017 :

Ada 7 ormas islam dan 8 pondok pesantren yang pro terhadap pemerintah sehingga keberadaan mereka sangat membantu dalam pencegahan paham radikalisme dan kelompok garis keras di wilayah Surakarta. Bhabinkamtibmas sangat terbantu dalam menyampaikan pesan – pesan kepada masyarakat agar tidak salah dalam memahami agama khususnya yang beragama islam.

Munculnya kelompok – kelompok radikal salah satunya disebabkan karena kurangnya pemahaman atau dangkalnya pengetahuan terhadap ilmu agama, sehingga orang – orang yang kurang ilmu agamanya tersebut sangat mudah dipengaruhi untuk bergabung dengan kelompok radikal dan islam garis keras. Oleh karena itu keberadaan ormas islam yang pro NKRI sangat penting dalam pencegahan berkembangnya paham radikalisme agam di Surakarta karena mereka dapat memberikan ceramah – ceramah atau pengajian dan sebagainya agar masyarakat islam di wilayah Surakarta lebih paham tentang ilmu agama dan tidak mudah terpengaruh untuk bergabung dengan kelompok islam garis keras yang ada di Surakarta.

Berikut ini adalah pemetaan pondok pesantren dan ormas – ormas islam yang pro kepada Polri dan bisa dijadikan sebagai faktor pendukung dalam kegiatan sambang yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas untuk mencegah paham radikal dan Islam garis keras :

Gambar 4.4 **Pemetaan ormas Islam pro pemerintah**



Sumber : Intel dasar Polresta Surakarta

Beberapa faktor eksternal yang dijelaskan diatas, bisa dijadikan sebagai pendukung terhadap Bhabinkamtibmas untuk melakukan upaya pencegahan terhadap paham radikalisme, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan maupun program yang telah direncanakan yang berkaitan dengan pencegahan paham radikalisme di Kota Surakarta.

d. *Threat* (ancaman)

Dalam melakukan upaya pencegahan paham radikalisme yang ada di Kota Surakarta terdapat beberapa ancaman serta tantangan yang harus dihadapi oleh Bhabinkamtibmas yang berasal dari luar. Ancaman serta tantangan tersebut termasuk dalam faktor eksternal yang menghambat pelaksanaan sambang dalam mencegah paham radikalisme di wilayah Kota Surakarta. Ancaman yang pertama adalah dari masyarakat khususnya yang beragama islam, masih banyak masyarakat yang kurang pemahaman terhadap ilmu agama, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh kelompok - kelompok islam garis keras dalam merekrut anggota - anggota baru untuk bergabung dan diberikan pemahaman - pemahaman yang salah tentang ilmu agama. Hal ini juga disampaikan oleh Kasatbinmas Polresta Surakarta Kopol Suharmono pada wawancara hari selasa tanggal 7 maret 2017 di ruangnya :

Biasanya, orang - orang yang bergabung dalam kelompok radikal di Surakarta ini adalah orang yang kurang paham terhadap ilmu agama. Jadi pengikut - pengikut kelompok radikal bukanlah orang - orang yang paham betul dengan agama. Justru sebaliknya kebanyakan yang paham tentang ilmu agama malah anti dengan kelompok radikal dan

mendukung pencegahan yang dilakukan Polri dan Pemerintah dalam mencegah tindakan – tindakan dari kelompok – kelompok tersebut.

Kemudian ancaman yang selanjutnya dalam pencegahan paham radikalisme di wilayah Surakarta ini adalah banyak anggota – anggota dari kelompok radikal dan islam garis keras tersebut adalah orang yang pernah sakit hati karena Polri. Bisa karena mereka pernah ingin mencoba ikut seleksi anggota Polri tetapi gagal, bisa juga orang – orang yang merasa pernah diperlakukan secara tidak baik oleh anggota Polri. Sehingga ketika Bhabinkamtibmas melakukan sambang di suatu kelurahan yang terdapat tempat perkumpulan kelompok – kelompok radikal dan islam garis keras, pengikut – pengikut kelompok tersebut menunjukkan sikap yang kurang bersahabat terhadap Bhabinkamtibmas. Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas Aipda Sumarsono saat wawancara pada tanggal 8 maret 2017 di Polsek Banjarsari :

Terkadang saat kita sedang melaksanakan sambang di suatu kelurahan, disitu ada pengikut – pengikut dari kelompok islam yang fanatik. Mereka menunjukkan sikap kurang bersahabat dengan kita karena banyak diantara mereka yang pernah sakit hati kepada Polri. Kita merasa kurang nyaman dengan sikap mereka terhadap kita. Tetapi disamping itu kita harus tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai Bhabinkamtibmas.

Dari analisa peneliti yang dilakukan dengan analisis SWOT diatas dapat disimpulkan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sambang yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah paham radikalisme di Wilayah hukum Polresta Surakarta yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Dan masing – masing dari faktor internal maupun faktor eksternal tersebut ada yang menghambat dan ada juga yang mendukung pelaksanaan sambang oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah paham radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta.

4.4 Optimalisasi sambang oleh bhabinkamtibmas dalam mencegah paham radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta dan analisis

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya). Dalam hal ini, pelaksanaan sambang yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polresta Surakarta diharapkan menjadi paling optimal, paling baik atau paling bagus dalam mencegah paham radikalisme di Kota Surakarta. Pelaksanaan sambang oleh bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polresta Surakarta sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan. Sehingga kekurangan tersebut harus diperbaiki agar pelaksanaannya menjadi optimal sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan sambang, Bhabinkamtibmas harus menerapkan strategi polmas sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2015, pada pasal ke 6 sebagai berikut :

Strategi polmas dilaksanakan melalui;

- a. kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas;
- b. pemecahan masalah;
- c. pembinaan keamanan swakarsa;
- d. penitipan eksistensi FKPM ke dalam pranata masyarakat tradisional;
- e. pendekatan pelayanan Polri kepada masyarakat;
- f. bimbingan dan penyuluhan;
- g. patroli dialogis;
- h. intensifikasi hubungan Polri dengan komunitas;
- i. koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepolisian; dan
- j. kerja sama bidang Kamtibmas.

Dengan menerapkan strategi polmas diatas maka Bhabinkamtibmas akan bisa melaksanakan sambang secara optimal yaitu pada poin e yaitu pendekatan pelayanan Polri kepada masyarakat, dengan mendekati diri kepada masyarakat maka masyarakat akan merasa simpati kepada Polri sehingga Masyarakat akan timbul kesadaran kamtibmas yang tinggi terkhusus dalam penolakan terhadap paham radikalisme di Kota Surakarta.

Kemudian pada pasal 3 Peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2015 juga disebutkan bahwa :

Polmas dilaksanakan dengan prinsip hubungan personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal / birokratis. Dalam hal ini dimaksudkan agar para bhabinkamtibmas di Polresta Surakarta dalam melakukan sambang sekaligus melakukan pendekatan yang bersifat pribadi kepada pemimpin – pemimpin kelompok radikal yang ada di Kota Surakarta agar mereka merasa dekat dengan Polri dan diharapkan tidak melakukan tindakan radikal yang mengganggu ketertiban masyarakat lagi.

Optimalisasi pelaksanaan sambang oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah paham radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta juga dapat dilakukan dengan cara memberikan *reward and punishment* yang nyata bagi Bhabinkamtibmas yang berprestasi ataupun sebaliknya. Sehingga masing – masing Bhabinkamtibmas di jajaran Polresta Surakarta akan memiliki motivasi lebih dalam bertugas khususnya pelaksanaan sambang.

Dari segi SDM, optimalisasi sambang oleh Bhabinkamtibmas dapat dilakukan dengan memberikan latihan kepada Bhabinkamtibmas yang belum mengikuti latihan seperti yang dijelaskan pada pembahasan 4.3 diatas. Selain diberikan pelatihan atau pendidikan kejuruan, Bhabinkamtibmas yang belum mendapatkan latihan juga bisa diberikan VCD fungsi sehingga mereka dapat berlatih secara otodidak melalui VCD tersebut. Selain itu juga, Bhabinkamtibmas yang belum latihan dapat belajar dan menambah kemampuan mereka dengan cara

bertanya kepada Bhabinkamtibmas yang sudah senior ataupun yang sudah mahir agar menularkan ilmunya kepada Bhabinkamtibmas yang belum mendapatkan latihan. Dengan diberikannya latihan atau diberikan VCD fungsi kepada Bhabinkamtibmas, maka pelaksanaan sambang akan berjalan optimal karena Bhabinkamtibmas sudah menguasai teknik – teknik dan ilmu komunikasi yang baik dalam berinteraksi dengan masyarakat. Komunikasi yang baik sangat berperan penting dalam pelaksanaan sambang yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas karena kegiatan sambang adalah kegiatan yang membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik antara Bhabinkamtibmas kepada masyarakat agar pesan – pesan yang disampaikan berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya tentang paham radikalisme di wilayah Kota Surakarta dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan sambang ini juga harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan berjenjang. Berdasarkan hasil yang didapatkan pada saat penelitian, penulis menganalisis temuan penelitian tersebut dengan fungsi dasar teori manajemen George R Terry yaitu *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*, berikut adalah penjelasannya :

a. *Planning*

Dalam perencanaan perlunya suatu sasaran dan tujuan yang jelas dari suatu program, karena hal ini akan memberikan arah dan ukuran keberhasilan atau kegagalan. Dari beberapa temuan yang didapat, penulis melihat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa masih ada Bhabinkamtibmas yang belum pernah mengikuti latihan. Langkah yang diambil Polresta Surakarta adalah memberikan pelatihan kepada Bhabinkamtibmas yang belum pernah mengikuti latihan tersebut. Selain mengadakan pelatihan untuk Bhabinkamtibmas, masyarakat juga harus diberikan penataran, dan sosialisasi berkaitan dengan tugas dan peran Bhabinkamtibmas. Harapannya dengan adanya persamaan pemahaman program ini masyarakat menjadi dekat dengan para Petugas Bhabinkamtibmas karena dengan memberikan pelayanan yang sama diseluruh wilayah hukum Polres Pasuruan sama artinya dengan menyeragamkan pelayanan dan masyarakat mengetahui fungsi dan peran dari Petugas Bhabinkamtibmas. Selain mengadakan pelatihan dan sosialisasi, bentuk perencanaan yang dilakukan Satbinmas Polresta Surakarta adalah membuat surat perintah tugas kepada Bhabinkamtibmas. Hal ini sebagai dasar hukum bagi Bhabinkamtibmas yang akan melaksanakan tugas dan target yang ingin dicapai juga sudah jelas tertera di dalam surat perintah tersebut. Kemudian perencanaan yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan pejabat atau instansi terkait. Hal ini ditujukan agar pelaksanaan sambang tidak dilaksanakan secara mendadak dan objek yang akan disambangi dapat mempersiapkan untuk kegiatan sambang tersebut.

b. *Organizing*

Tujuan utama dalam pengorganisasian adalah untuk membantu orang – orang bekerja bersama secara efektif, dimana pengorganisasian ini ditujukan dengan proses pembagian kerja. Hal ini untuk menghindari dari pemberian beban tanggung jawab yang berlebihan kepada satu orang saja. Beban tanggung jawab ini harus diimbangi dengan pemberian kewenangan dalam mengatur sebuah kegiatan.

Dalam optimalisasi sambang ini, Kapolresta Surakarta memberdayakan seluruh Bhabinkamtibmas yang ada untuk mendukung keberhasilan kegiatan sambang. Kasatbinmas sebagai penyelenggara fungsi pembinaan para petugas Bhabinkamtibmas, Kasatbinmas ikut mengawasi jalannya kegiatan sambang. Pada lingkungan Polsek, Kapolsek diberikan wewenang penuh untuk mengelola Bhabinkamtibmas dan bentuk tanggung jawab yang diharapkan adalah Kapolsek ikut aktif dalam mengontrol jalannya kegiatan sambang ini, agar dalam mengambil keputusan dapat mengetahui keadaan nyata di lapangan serta dapat menyampaikan ke tingkat yang lebih tinggi mengenai hambatan – hambatan yang di luar kewenangannya. Kemudian di tingkat desa, para petugas Bhabinkamtibmas adalah sebagai pelaksana tugas utama dalam pelaksanaan sambang untuk mencegah paham radikalisme, Bhabinkamtibmas melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh untuk ikut dalam kelompok – kelompok radikal dan islam garis keras yang ada di wilayah Kota Surakarta. Berkaitan dengan diberlakukannya pos jaga di Polsek jajaran Polresta Surakarta, dimana Bhabinkamtibmas dilibatkan dalam tugas jaga, seharusnya Bhabinkamtibmas tidak terlibat dalam tugas jaga tersebut sehingga para Bhabinkamtibmas lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya sendiri di kelurahan termasuk kegiatan sambang yang dilakukan untuk mencegah paham radikalisme di wilayah Surakarta.

c. *Actuating*

Kegiatan sambang yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas adalah untuk menyampaikan pesan – pesan kamtibmas kepada masyarakat melalui bimbingan dan penyuluhan. Sesuai dengan pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007, hal – hal yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan penyuluhan antara lain :

Pertama, memperkenalkan identitas diri. Dalam pelaksanaannya, petugas Bhabinkamtibmas biasanya sudah dikenal baik di kelurahan dimana ia ditugaskan sehingga Bhabinkamtibmas yang bersangkutan tidak lagi memperkenalkan identitas dirinya. Terkecuali apabila Bhabinkamtibmas melaksanakan sambang dengan personil Binmas yang lainnya, maka semua petugas yang terlibat kegiatan tersebut harus memperkenalkan diri yang meliputi : nama lengkap, nama panggilan, berasal dari fungsi mana, tujuan penyuluhan, dan asal daerah.

Kedua, menyampaikan materi atau permasalahan secara keseluruhan, cara pemecahannya, dan langkah – langkah antisipasinya. Penyuluhan kamtibmas pada kegiatan sambang harus memenuhi semua aspek tersebut masyarakat mengetahui berbagai masalah kamtibmas dan bagaimana cara mengantisipasinya sehingga masyarakat dapat berpartisipasi penuh dalam pencegahan gangguan kamtibmas khususnya pencegahan paham radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta.

Ketiga, penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Bahasa yang digunakan masyarakat Surakarta adalah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, karena masyarakat Surakarta yang masih kental dengan bahasa Jawa-nya dan cenderung menggunakan bahasa Jawa dalam berinteraksi sehari – hari. Hal ini tidak menjadi masalah bagi Bhabinkamtibmas yang ada di Surakarta karena hampir seluruhnya fasih menggunakan bahasa Jawa. Dengan demikian,

masyarakat yang menerima penyuluhan pada kegiatan sambang dapat mudah memahami apa yang disampaikan Bhabinkamtibmas.

Beberapa syarat – syarat diatas harus dilakukan Bhabinkamtibmas agar masyarakat dapat menerima dengan baik penyuluhan yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas sehingga pelaksanaan sambang dalam mencegah paham radikalisme dapat berjalan secara optimal di wilayah hukum Polresta Surakarta.

d. Controlling

Kegiatan sambang yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah paham radikalisme ini harus dilakukan pengawasan dengan membandingkan tujuan yang ingin dicapai saat proses perencanaan, dengan pelaksanaan kegiatannya. Jika sudah memenuhi maka dapat dikatakan bahwa kegiatan sambang tersebut berjalan secara optimal.

Peran dari Kasatbinmas selaku pembina fungsi adalah untuk memperhatikan apabila ada kesenjangan antara perencanaan dan pencapaian. Untuk itu perlu suatu umpan balik dari para Bhabinkamtibmas. Pengawasan yang dilakukan Kasatbinmas melalui anev yang dilaksanakan di Polresta Surakarta, maupun melalui laporan langsung oleh Bhabinkamtibmas dalam bentuk dokumentasi kegiatan yang dikirim melalui aplikasi *whats'app*. Kopol Suharmono selaku Kasatbinmas Polresta Surakarta pada wawancara hari selasa tanggal 7 maret di ruangnya mengatakan sebagai berikut:

Pengawasan yang saya lakukan pada kegiatan sambang yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas ini dengan melakukan anev, atau bisa juga saya turun langsung ke lapangan. Jadi terkadang saya langsung mengecek ke lapangan apakah benar petugas Bhabinkamtibmas sudah melaksanakan sambang di wilayahnya. Selain itu, di jajaran Polda Jawa Tengah sudah ada program *smile police*, di dalam program *smile police* tersebut ada program *e-bhabinkamtibmas* yang berisi tentang laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Bhabinkamtibmas. Jadi program *smile police* ini sangat membantu saya dalam melakukan pengawasan kepada Bhabinkamtibmas yang bertugas.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kapolsek juga sama dengan yang dilakukan Kasatbinmas. Untuk kegiatan evaluasi dilakukan Kapolsek pada saat apel pagi dan memberikan penghargaan kepada Bhabinkamtibmas yang berprestasi dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian pelaksanaan sambang oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah paham radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta dapat berjalan secara optimal.

Selanjutnya dalam mengoptimalkan pelaksanaan sambang ini, Bhabinkamtibmas dan umumnya Satbinmas Polresta Surakarta harus bisa bekerja sama dengan instansi samping seperti Kodim maupun Pemda setempat sehingga dalam melaksanakan sambang kepada masyarakat lebih efektif dan lebih meyakinkan masyarakat bahwa POLRI benar-benar berkomitmen dalam melakukan pencegahan terhadap paham radikalisme di Kota Surakarta. Khususnya di tingkat desa atau kelurahan, Bhabinkamtibmas seharusnya selalu

bekerjasama dengan Babinsa yang ada di wilayah tersebut dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari agar masyarakat dapat melihat bahwa adanya hubungan yang erat dan harmonis antara TNI dan POLRI sehingga masyarakat lebih yakin terhadap pesan-pesan kamtibmas yang disampaikan khususnya mengenai masalah radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta.

PENUTUP

6.1 Simpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan sambang oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah paham radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta berada dibawah kendali langsung oleh Kapolsek jajaran Polresta Surakarta. Namun Kasatbinmas selaku pembina fungsi tetap mengawasi langsung kinerja Bhabinkamtibmas. Kegiatan sambang yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas ini dibantu oleh program *smile police* yang ada di jajaran Polda Jawa Tengah. Program tersebut membantu Kasatbinmas maupun Kapolres dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Bhabinkamtibmas. Di dalam program tersebut terdapat fitur *e-bhabinkamtibmas* yang berfungsi sebagai bukti pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas yang dapat diakses langsung oleh pimpinan sehingga memudahkan pimpinan dalam mengawasi tugas dari Bhabinkamtibmas. Pelaksanaan sambang oleh Bhabinkamtibmas di Polresta Surakarta juga didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, seperti sepeda motor maupun dukungan konsumsi BBM kepada Bhabinkamtibmas dalam bertugas setiap hari. Tetapi untuk inventaris yang lain seperti rompi dan senter, Bhabinkamtibmas menyiapkan sendiri karena tidak ada dukungan dari kedinasan. Dengan demikian pelaksanaan sambang yang dilakukan Bhabinkamtibmas dalam mencegah paham radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan strategi polmas yang terdapat dalam pasal 6 Perkap No. 3 Tahun 2015.
- b. Faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sambang oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah paham radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta adalah masih ada beberapa Bhabinkamtibmas yang belum mengikuti pelatihan. Dari 51 Bhabinkamtibmas yang ada di Surakarta, 9 diantaranya masih belum mengikuti pelatihan Bhabinkamtibmas. Kemudian masih adanya tugas jaga Polsek bagi Bhabinkamtibmas sehingga terkadang harus mengikuti kegiatan di Kelurahan dan meninggalkan tugas jaganya di Polsek.
- c. Optimalisasi sambang oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah paham radikalisme di wilayah hukum Polresta Surakarta dapat dilakukan

dengan manajemen yang baik dan mempedomani Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Polmas, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu dapat juga dilakukan dengan cara memberikan pelatihan bagi Bhabinkamtibmas yang belum pernah mendapatkan pelatihan tentang Bhabinkamtibmas agar kemampuan komunikasi yang dimiliki Bhabinkamtibmas menjadi lebih baik serta menambahkan sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaan sambang dapat berjalan secara optimal.

6.2 Saran

Sebagaimana simpulan yang telah sebelumnya bahwa pelaksanaan sambang oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah paham radikalisme di wilayah huku Polresta Surakarta belum optimal, maka diajukan saran sebagai berikut :

- a. Agar pelaksanaan sambang yang dilakukan Bhabinkamtibmas tidak hanya dalam acara formal atau acara resmi saja, tetapi juga sebaiknya Bhabinkamtibmas melakukan sambang di tempat – tempat berkumpulnya masyarakat seperti warung kopi, lapangan tempat olahraga, atau bisa juga melaksanakan sambang langsung ke rumah – rumah warga agar warga merasa lebih dekat dengan Polri khususnya para Bhabinkamtibmas
- b. Agar Bhabinkamtibmas tidak dilibatkan dalam tugas jaga di Polsek agar lebih fokus dalam mengemban tugas Polmas khususnya melaksanakan sambang untuk mencegah paham radikalisme di wilayah Polresta Surakarta.
- c. Memberikan pelatihan bagi anggota Bhabinkamtibmas agar kemampuan komunikasi menjadi lebih baik sehingga pesan – pesan kamtibmas yang disampaikan kepada masyarakat lebih mudah dimengerti. Selain memberikan pelatihan, Bhabinkamtibmas dapat juga diberikan VCD fungsi agar dapat berlatih secara otodidak
- d. Meningkatkan kerjasama dengan instansi samping seperti Kodim dan Pemda, khususnya di tingkat desa atau kelurahan agar Bhabinkamtibmas selalu bersama dengan Babinsa dalam melaksanakan kegiatan sambang.
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana seperti, senter, jas hujan, rompi Polri dan sarana lainnya yang dapat menunjang kinerja dari Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Adisaputra, Asep. 2006. *Imam Samudra Berjihad*. Jakarta : Pensil-324
- Moleong, lexy j. 2013. *Metodologi penelitian kualitatif (edisi revisi)*. Jakarta : Rosda
- Terry, George R. 2016. *Prinsip-prinsip manajemen*. Jakarta : Bumi aksara
- Soegiyono. 2014. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta
- Karyoso. 2005. *Manajemen Perencanaan Dan Penganggaran*. Jakarta : Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
- Hunger, J. David. 2012. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta : Andi
- Muhammad, Farouk & H. Djaali. 2005. *Metodologi penelitian sosial edisi revisi*. Jakarta : PTIK Press & Restu Agung
- Lofland, John & Lynn Lofland. 1984. *Analizing Social Setting*. California : Wadsworth Publicing Company
- Andi prastowo. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor
- Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme

Sumber Internet

- Penemuan Bom di Bekasi dalam www.tribunsolo.com : 10 desember 2016.
- Radikalisme Sebab dan Terapinya dalam www.almanhaj.or.id : 12 april 2015